



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH RAPAT  
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI X DPR RI DENGAN  
PENGURUS LEMBAGA ANTI-DOPING INDONESIA (LADI)**

- Tahun Sidang : 2021-2022  
Masa Persidangan : II  
Rapat Ke- : -  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/Tanggal : Senin, 8 November 2021  
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d.16.51 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi X Gedung  
Nusantara I DPR RI  
(secara Fisik dan Virtual)
- Ketua Rapat
1. AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S. / Wakil Ketua Komisi X DPR RI
  2. DR. H. ABDUL FIKRI FAQIH / Wakil Ketua Komisi X DPR RI
- Acara : Membahas Sanksi *World Anti-Dopping Agency* ke Indonesia
- Sekretaris Rapat : Dadang Prayitna, S.IP., M.H.  
(Kabag Sekretariat Komisi X DPR RI)
- Hadir : **Pimpinan:**
1. H. SYAIFUL HUDA
  2. AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S.
  3. Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, MPP.
  4. DEDE YUSUF M.E, S.T., M.I.Pol.
  5. DR. H. ABDUL FIKRI FAQIH

**Anggota:**

**Fraksi PDI Perjuangan**

6. dr. SOFYAN TAN
7. PUTRA NABABAN
8. MY ESTI WIJAYATI
9. PUTI GUNTUR SUKARNO, S.IP. (I)
10. Dr. AHMAD BASARAH (I)
11. M. GURUH IRIANTO SUKARNO PUTRA (I)
12. RANO KARNO, S.IP.
13. Dr. ANDREAS HUGO PAREIRA
14. Dra. ADRIANA CHARLOTTE DONDOKAMBAY, M.Si. (I)
15. VANDA SARUNDAJANG

**Fraksi Partai GOLKAR**

16. FERDIANSYAH, S.E., M.M.
17. Dr. H. A. MUJIB ROHMAT, M.H.
18. H. MUHAMMAD NUR PURNAMASIDI
19. DR. Drs. ADRIANUS ASIA SIDOT, M.Si.
20. ADRIAN JOPIE PARUNTU
21. ROBERT JOPPY KARDINAL, SAB.

**Fraksi Partai GERINDRA**

22. ALI ZAMRONI, S.Sos.
23. Prof. Dr. Ir. DJOHAR ARIFIN HUSIN
24. Hj. HIMMATUL ALIYAH, S.Sos., M.Si. (I)
25. Ir. H. NUROJI (I)
26. MARTINA, S.I.Kom., M.Si.
27. H. MUHAMMAD NUR
28. ELNINO M. HUSEIN MOHI, S.T., M.Si.

**Fraksi Partai NASDEM**

29. RATIH MEGASARI SINGKARU, M.Sc.
30. RIAN FIRMANSYAH, S.Pd.
31. LESTARI MOERDIJAT
32. M. SYAMSUL LUTHFI, S.E.
33. Dra. Hj. TINA NUR ALAM, M.M. (I)

**Fraksi PKB**

34. Dr. H. MUHAMMAD KADAFI, S.H., M.H.
35. Drs. H. BISRI ROMLY, M.M.
36. MUH. HASSANUDIN WAHID (I)
37. H. AN'IM FALACHUDDIN MAHRUS (I)
38. Drs. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY, M.Si. (I)

**Fraksi Partai DEMOKRAT**

39. A. S. SUKAWIJAYA ALIAS YOYOK SUKAWI
40. Ir. BRAMANTYO SUWONDO, M.M.
41. DEBBY KURNIAWAN, S.Kom. (I)
42. ANITA JACOBA GAH, S.E.

**Fraksi PKS**

43. Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.T. (I)
44. H. MUSTAFA KAMAL, S.S.
45. Dr. H. FAHMI ALAYDROES, M.M., M.Ed. (I)
46. Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag. (I)

**Fraksi PAN**

47. Hj. DEWI CORYATI, M.Si. (I)
48. DESY RATNASARI, M.Si., M.Psi. (I)
49. Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.
50. MITRA FAKHRUDDIN MB. (I)

**Fraksi PPP**

- 51. Hj. ILLIZA SAADUDIN DJAMAL, S.E. (I)
- 52. ROJIH (I)

Undangan

- 1. dr. MUSTHOFA FAUZI (Ketua Umum LADI)
- 2. Dr. RHEZA MAULANA SYAHPUTRA., BMedSc (Hons), MM, MARS. (Wakil Ketua Umum LADI)
- 3. drg. DESSY ROSMELITA (Sekjen LADI)
- 4. Drs. GATOT SULISTIANTORO DEWA BROTO, M.B.A. (Dewan Pembina LADI)
- 5. SRI WAHYUNI, S.T., M.Sc. (Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenpora RI)

**KETUA RAPAT / F-PDI PERJUANGAN (AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S.):**

Selamat datang Pak Gatot. Luar biasa ini, sahabatnya Komisi X. Kita mulai ya, izin Pak Fikri mulai.

*Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*  
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Yang kami hormati dari Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI). Hari ini hadir berserta kita adalah Bapak dr. Musthofa Fauzi. Selamat siang Pak.  
Kemudian Waketum ada dr. Rheza Maulana selamat siang.  
Kemudian drg. Dessy Rosmelita. Oh yang di sana ya? Di sini juga ada Desy, Desy Ratnasari. Oh praktik psikologi.

Pak Rano nih *well inform* banget ya kalau soal Teh Desy ini, semangat korsa, yang ditanya pasiennya siapa Pak?

Kemudian Dewan Pembina LADI. Ini rupa-rupanya adalah sahabat Komisi X Bapak Gatot S. Dewa Broto, Beliau ini bersama Komisi X mungkin satu minggu bisa setiap hari terutama pada masa kita membahas RUU mengenai Sistem Keolahragaan Nasional.

Kemudian Ibu Sri Wahyuni, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenpora ini sama juga Sri Wahyuni nih wajahnya sudah kayak Komisi X persis.

Pak Fikri, Pak Dede.

Para Anggota Komisi X yang terhormat.

Hadirin sekalian yang berbahagia.

Kesempatan ini marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena diberikan kesempatan untuk hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan tidak hanya kita yang sehat tapi seluruh masyarakat Indonesia sehat dan pandemi COVID-19 berangsur-angsur dapat kita hadapi dengan baik sehingga perekonomian dapat tumbuh dengan baik pula.

Menurut laporan dari sekretariat sudah kuorum karena lebih dari separuh unsur fraksi dengan demikian kuorum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 281 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib telah terpenuhi. Dengan mengucap *bismillahirrohmanirrohim* kami buka rapat ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.42 WIB)**

**Bapak/Ibu yang kami hormati.**

Agenda tunggal pada hari ini terkait dengan materi sanksi *World Anti-Dopping Agency* (WADA). Hanya satu itu apakah disetujui atau bisa

ditambahkan lain-lain? Mungkin masukan yang berkaitan dengan RUU SKN. Setuju ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

Salah satu tujuan dari keikutsertaan olahraga nasional di *event* internasional adalah mencapai prestasi atas nama bangsa Indonesia. Selain agenda diplomatik yang diselenggarakan di forum internasional kemenangan para olahragawan atau atlet nasional yang mampu mengibarkan bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia di tingkat nasional adalah merupakan kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu wajib menghormati prestasi atlet dan tidak boleh menyia-nyiakannya keringat mereka dalam memperjuangkan kemenangan *event* olahraga. Mereka wajib didukung dengan anggaran dan berbagai macam sarana dan prasarana termasuk hubungan yang bersifat administratif, dukungan dalam bentuk perundang-undangan yang dapat melancarkan perjuangan para olahragawan.

Tidak diizinkan bendera merah putih berkibar pada *ceremony* kemenangan Tim Thomas Cup Indonesia di Denmark sangat mengejutkan kita semua. Lembaga Anti-Doping Indonesia terkena sanksi dari *World Anti-Doping Agency* mengakibatkan tidak diizinkan bendera merah putih dikibarkan di ajang olahraga internasional itu dan Indonesia juga tidak berhak menjadi tuan rumah di kejuaraan regional maupun internasional.

Secara kronologi informasi yang disampaikan oleh Menpora RI dalam penjelasan pers dan penjelasan di media adalah sebagai berikut. Nomor satu, kenapa jadi batuk ya? Kayaknya harus diteruskan Pak Fikri deh.

**KETUA RAPAT / F-PKS (DR. H. ABDUL FIKRI FAQIH):**

Baik saya teruskan ini. Mohon maaf ini karena ada gangguan teknis.

Pak Ketua LADI, Pak Waketum, Ibu Sekjen, Dewan Pembina, dan Kepala Biro Perencanaan.

Mohon maaf saya teruskan ini atas permintaan ketua, *monggo* enggak apa-apa Ibu. Ini tadi saya teruskan secara kronologi ini betul atau tidak nanti perlu dikonfirmasi atau mungkin dibetulkan. Ini informasi yang ada tentu di Komisi X ya. WADA mengirim surat teguran pada 15 September 2021 kepada LADI karena tidak mengirimkan sampel uji doping pada 2020 dan 2021. WADA memberi waktu selama 21 hari untuk mengklarifikasi. Ini informasi pertama. Kemudian informasi kedua WADA mengirim surat ancaman sanksi karena belum adanya tanggapan dari LADI pada tanggal 7 Oktober 2021.

Kemudian yang ketiga, Kementerian Pemuda dan Olahraga dan LADI pada tanggal 8 Oktober 2021 memberikan klarifikasi antara lain bahwa sanksi tersebut karena tidak adanya kegiatan olahraga selama pandemi COVID-19 sehingga tidak ada sampel anti-doping. Sejumlah atlet yang sudah direncanakan untuk diambil sampel urine sudah mengikuti kejuaraan di luar negeri yakni saat Olimpiade Tokyo dan pengurus LADI sedang mengalami

pergantian kepada pengurus baru. Yang keempat pada Minggu 17 Oktober 2021 bendera merah putih tak berkibar di Thomas Cup 2020 meski kita menjuarai Piala Thomas 2020 di Denmark dan digantikan dengan bendera PBSI.

Selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2021 Menpora dan dalam rakor internal yang dihadiri oleh Ketua NOC, Raja Sapta Oktohari. Indonesia Raya, Mas Okto maksudnya dan Sekjen LADI membentuk tim akselerasi dan investigasi. Ditunjuk ketua tim adalah Ketua NOC Indonesia Raja Sapta Oktohari dengan anggota Sekjen NOC dua orang pengurus LADI. Kok juga ketularan saya suaranya? Karena ini jangan-jangan kena anti-doping ini apa minum doping dahulu tadi?

Pada 24 Oktober 2021 Ketua NOC Indonesia dan tim akselerasi dan investigasi melakukan pertemuan di sela-sela pertemuan umum Asosiasi Komite Olimpiade National *General Assembly* ANOC di Yunani dengan Presiden WADA Witold Banka dan Sekretaris Jenderal WADA Olivier Niggli. Selanjutnya tim akselerasi dan investigasi mendorong LADI untuk segera menyelesaikan 24 masalah yang tertunda yang menjadi syarat bebas dari sanksi WADA dengan pendampingan khusus dari Badan Anti-Doping Jepang (JADA) untuk melakukan supervisi terhadap LADI. Kemudian terakhir permasalahan yang tertunda (*pending matters*) sejumlah 24 masalah tersebut antara lain ketidakpatuhan LADI terhadap rencana tes doping tahunan kendala mengisi *code of compliance* di akun WADA dan tunggakan tagihan ke laboratorium anti-doping di Qatar sekitar 300 juta rupiah.

### **Hadirin yang kami hormati.**

Sanksi yang diberikan kepada Indonesia merupakan salah satu wujud betapa tidak maksimalnya dukungan terhadap perjuangan para olahragawan yang telah berjuang mengibarkan merah putih di forum internasional. Oleh karena itu pada hari ini pengurus LADI perlu memberikan penjelasan mengenai langkah yang telah diambil oleh LADI dan pemerintah dan progres dari langkah penyelesaian tersebut. Ini karena ancumannya ada *event-event* internasional yang akan digelar di Indonesia itulah yang kemudian banyak kebingungan dan kekhawatiran.

Demikian pengantar kami di pertemuan RDPU ini. Sebelum mungkin nanti kita serahkan kembali ke Ketua, Pimpinan dan nanti Ketua LADI menyampaikan paparannya. Kita sepakat sampai jam 15.00 WIB, jam 15.00 WIB mau ada ini ya ambil sampel *swab*. Jam 15.00 WIB mau *swab*, kita *swab* karena, eh jam 17.00 WIB kita akan mendampingi Pak Gatot begitu ya jadi syaratnya harus dicolok dahulu sehingga kita di sini sampai jam berapa ini? Sampai jam 16.00 WIB ya? Jam 16.00 WIB *dok* ya.

### **(RAPAT: SETUJU)**

Oh belum selesai.

Selanjutnya untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada Ketua Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) untuk memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan RDPU hari ini dan *monggo* dr. Musthofa Fauzi Ketua Umum LADI dipersilakan.

**KETUA UMUM LADI (dr. MUSTHOFA FAUZI):**

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

*Shalom.*

*Om swastiastu.*

*Namo buddhaya.*

Salam kebajikan.

Salam olahraga.

Jaya!

Izin kami membuka menurunkan masker supaya lebih enak dalam berbicara. Yang pertama-tama mari sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang mana pada sore hari ini kita dikaruniai nikmat bisa bertemu silaturahmi antara pengurus LADI dengan anggota dewan yang kami hormati. Pertama-tama kami sangat berterima kasih kepada Pimpinan DPR RI khususnya Pimpinan Komisi X DPR RI yang telah mengundang kami pada hari ini untuk rapat dengar pendapat dari Kementerian Pemuda dan Olahraga mengenai sanksi yang diterima LADI. Kami didampingi oleh wakil ketua, sekjen, dan didampingi oleh pembina kami serta dari Ibu Karo.

Yang pertama kali ingin kami sampaikan adalah bagaimana sebenarnya biar kita sama-sama mengetahui status hukum kelembagaan LADI. Indonesia ini sudah terikat dengan ketentuan internasional tentang anti-doping setelah diratifikasinya *United Nations Convention* melalui Perpres Nomor 101 Tahun 2007. Sama halnya dengan NOC dan NPC ataupun KONI, organisasi Anti-Doping Indonesia yang selanjutnya saat ini masih bernama LADI kiranya dapat dicantumkan dalam nomenklatur pada Rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional mengingat pembentukan organisasi (suara tidak jelas) merupakan kewajiban internasional dari pemerintah sebagaimana ketentuan dari *convention* yang sudah diratifikasi.

Organisasi Anti-Doping harus bersifat mandiri dan profesional. Mandiri artinya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bebas dari intervensi dari pihak manapun. Sedangkan profesional bahwa ini tugas yang berdasarkan keahlian, berbasis ilmu pengetahuan dan bersifat interdisiplin. Tugas daripada kita yang melaksanakan anti-doping ini dilaksanakan sepanjang tahun yang diawali dengan baik-baik, aktivitas kita dalam sosialisasi mengenai anti-doping yang ditujukan kepada atlet, kepada pelatih, kepada dokter tim, dan kepada cabor-cabor, serta kita melakukan edukasi ini penting karena kita selalu menargetkan setiap *event* itu *zero doping*.

Kemudian hal yang paling penting lagi adalah pengawasan doping, pengawasan doping ini baik yang dilakukan di dalam kompetisi maupun di

luar kompetisi. Kami pengurus LADI yang saat ini bekerja berdasarkan SK dari Menpora Nomor 53 Tahun 2021 per tanggal 30 Juni 2021. Di dalam Undang-Undang Keolahragaan Nomor 5 tentang Keolahragaan Nasional yang secara khusus pasal-pasal anti-doping pada Pasal 1, di Pasal 85. Peraturan lainnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pertandingan Olahraga dan Kejuaraan, Peraturan Presiden 101 tahun 2007 tentang Pengesahan *International Convention Against Doping In Sport*.

Kemudian keputusan terakhir bersama dengan dokumen terkait lainnya seperti ketentuan referensi yaitu Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2021 tentang Lembaga Anti-Doping Indonesia. Kemudian ada juga keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penugasan Pengangkatan Dewan Pengawas dan Pengurus Lembaga Anti-Doping Indonesia dan terakhir adalah Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 53 Tahun 2021 pada penugasan dan pengangkatan dewan pengawas dan dewan pengurus LADI yang saat ini sedang bertugas.

Status hukum kelembagaan LADI kalau kita melihat di ketentuan bahwa *National Anti-Doping Organization* atau NADO of Indonesia harus bersifat Mandiri dan profesional sesuai dengan artikel 20.5.1 *World Anti-Doping Code* tahun 2021 atau lebih dikenal oleh *the code of WADA*. Di dalam artikel ini bahwa LADI memang harus bersih dalam operasionalnya bersifat independen dan aktivitasnya juga tidak boleh terpengaruh oleh pemerintah termasuk juga dalam pengaruh *internal federation*, maupun *national federation*, serta *major event organization*.

Jadi pembentukan Lembaga Anti-Doping Indonesia atau NADO Indonesia oleh pemerintah merupakan kewajiban internasional pemerintah sebagaimana tercantum dalam *United Nation Convention Against Doping In Sport* Tahun 2005 dan diratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2007 tentang Pengesahan *International Against Doping*. Di sini jelas sekali bahwa negara mempunyai kewajiban membentuk lembaga anti-doping yang otoritas utama dan tanggung jawabnya adalah mengadopsi dan mengimplementasikan semua aturan-aturan yang dikeluarkan oleh *World Anti- Doping Agency*. Yaitu mulai dari termasuk juga pengambilan *sampling* termasuk juga dengan *risk management*-nya dan juga termasuk *hearing* dalam satu kasus-kasus bilamana ditemukan ada kasus doping. Manakala negara tidak membuat, membentuk ini maka tugas ini diambil alih oleh *National Olympic Committee* atau KOI.

Jadi pada prinsipnya di dalam Sistem Keolahragaan Nasional undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 di Pasal 85 doping dilarang dalam semua kegiatan olahraga. Setiap induk organisasi cabang olahraga dan/atau lembaga atau organisasi olahraga nasional wajib membuat peraturan doping dan disertai sanksi. Pengawasan anti-doping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 pada Pasal 85 ini.



Kami akan menceritakan penyebab adanya sanksi dari WADA seperti juga yang disampaikan oleh tadi Bapak Pimpinan. LADI menerima surat ancaman sanksi dari WADA pada tanggal 15 September 2021 karena ada program pengujian dan administrasi yang tidak efektif. Surat dari WADA tidak mencantumkan secara jelas poin apa yang membuat LADI mendapatkan ancaman. Meskipun sudah berkomunikasi lebih lanjut dan memenuhi persyaratan secara aktif dengan WADA, LADI tetap dijatuhkan sanksi pada tanggal 7 Oktober 2021. Surat tersebut tetap tidak menjelaskan apa yang WADA harapkan dan apa yang harus LADI lakukan. WADA menemukan beberapa *pending matters* sejak tahun 2017 yang belum ditunaikan dan beberapa *pending matters* lain yang berpengaruh cukup signifikan terhadap kinerja LADI seperti masalah organisasi, masalah *budgeting*, dan masalah SDM dari LADI.

Pada surat tertanggal 20 Oktober 2021 barulah WADA mengirimkan daftar *pending matters* kepada LADI yang jumlahnya lebih kurang 24 *items*. Ditemukan masalah utama di sini setelah kami pelajari adalah masalah komunikasi, administrasi, dan teknis. Dari sini kami bisa mengetahui masalah komunikasi adalah WADA mengakui terdapat miskomunikasi antara LADI dan WADA. Ancaman sanksi kepada LADI sudah ada dan telah diinformasikan kepada pengurus LADI sebelumnya sejak tahun 2019 namun tidak ada *follow up* terkait permasalahan ini.

Pengurus LADI yang sekarang tidak mengetahui hal-hal pada poin-poin sebelumnya karena WADA berkorespondensi melalui email dengan pengurus LADI sebelumnya. WADA meminta *update* nama pada akhirnya setelah kami berkomunikasi dan sedikit protes WADA akhirnya meminta *update* nama dan kontak pengurus terbaru dari LADI pada tanggal 20 September 2021 dan padahal pada saat kami menduduki jabatan sebagai pengurus LADI pihak Kemenpora telah menyerahkan surat kepada WADA terjadi pergantian pengurus tapi tidak ada respons dari sana sejak di bulan Juli itu.

Kemudian masalah teknis administrasi. Ditemukannya *pending matters* terkait *Test Distribution Plan* atau TDP LADI yang perlu kita revisi. Ditemukan juga *pending matters* terkait pembayaran atau tertundanya pembayaran yang ada tagihan setelah kita mendapat sanksi, ancaman sanksi yaitu dari tahun 2017 dan tahun 2020 kepada laboratorium yang menjadi tempat kita sering mengirim sampel yaitu ADLQ atau *Anti-Doping Laboratory Qatar*. Selain itu terdapat 24 *pending matters* lainnya yang diinformasikan oleh Japan *Anti-Doping Agency*, *pending matters* terkait TDP dan pembayaran ini yang ditemukan oleh WADA. Seluruh 24 *pending matters* ini saat ini telah kami selesaikan dan telah dikirimkan informasi kepada WADA termasuk pembayaran-pembayaran juga telah kita lakukan. Jadi ada pembayaran yang tertunda yaitu sekitar 21.222 USD itu 2017 dan 2020 dari ADLQ atau *Anti-Doping Laboratory Qatar* telah kami selesaikan dan nilainya mendekati sekitar 300 juta tadi yang seperti disampaikan oleh Bapak.

Kemudian ada juga susulan tunggakan tagihan dari Laboratorium Anti-Doping Bangkok yaitu senilai 11.000 sekitar dan itu juga tahun 2019-an

kejadiannya dan kita telah lunasi semua. Kalau kita lihat memang TDP atau *Test Distribution Plan* dari Indonesia kalau kita lihat pada seminar Minggu lalu kita mengikuti seminar dari Korean Anti-doping kan kita selalu ikut aktif dengan acara konferensi yang *Zoom Meeting* yang lain ternyata itu negara-negara lain itu tidak sebanyak kita untuk menunaikan kewajiban tes anti-doping TDP-nya.

Nah 24 *pending matters* ini kalau kami sebutkan memang kita ada permasalahan-permasalahan struktur organisasi, kemudian masalah orang-orang yang urusan tadi ini, pengurus LADI, karena memang di *World Anti-Doping* itu diinginkan orang-orang yang bebas dari *conflict of interest*. Nah kebetulan kami bertiga ini saya seorang pensiunan, teman saya ini orang swasta tidak ada kaitan dengan pemerintah jadi tidak boleh sekali bahwa saya adalah pegawai Kemenpora umpamanya itu dilarang atau pengurus induk organisasi, pengurus KONI atau apa. Dokter Dessy juga adalah dokter gigi ya profesi biasa.

Jadi ini semuanya ini sudah kita laporkan semua. Kemudian mereka juga minta menginginkan bahwa kita harus punya tenaga *full timer*. Kita memang saat ini secara hukum belum menyebutkan diri kita *full timer* kalau *full timer* kan ada konsekuensi kewajiban hak dan wewenangnya dan ini memang kita belum ada. Kemudian dari WADA juga menginginkan adanya dia melihat *budget* kita itu seperti apa. Jadi dari tahun 2020, 2021 dan 2022 dan ini sudah kita laporkan semua. Kemudian dia juga melihat peraturan-peraturan mengenai olahraga bahwa LADI sudah semuanya kami serahkan seperti yang kita siapkan maupun yang ada di kita.

Termasuk juga kita telah membuat suatu kontrak kerja sama (PKS) dengan cabang-cabang olahraga yang ada di Indonesia dalam hal untuk yang selama ini memang tidak ada dari pengurus-pengurus lama itu. Karena LADI mempunyai *stakeholders* salah satunya adalah cabang-cabang olahraga ini dan kita mempunyai hak dan kewajiban antara LADI dengan cabang-cabang olahraga dalam hal untuk memberi informasi tentang pertandingan, tentang latihan atletnya, tentang di mana di dalam istilah WADA itu *where about athlete*. Jadi kita harus tahu atletnya sedang pelatnas, atletnya sedang bertanding atau apa sehingga kita mudah untuk sewaktu-waktu melakukan *out of competition test* karena ini termasuk di dalam TDP.

Nah kemudian LADI juga belum pernah mengikat kerja sama kontrak dengan laboratorium karena kami memang sebelum kita mendapatkan ancaman sanksi kita bersurat dengan laboratorium Qatar. Pada saat itu di awal-awal Juli, di Juli kami mulai aktif bekerja, saya bertanya pada rapat pertama kami apakah kita mempunyai ikatan kerja sama dengan laboratorium? Ternyata tidak pernah ada. Kita bersurat, mereka belum bisa membuat ikatan kerja sama. Ternyata di belakang hari setelah kita adanya kejadian ini kita punya tunggakan Pak, setelah kita lunasi baru mereka mengirimkan draf kontrak. Saat ini sudah karena dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris kita terjemahkan dan saat ini sedang dalam proses untuk penandatanganan dalam beberapa hari ini setelah kita lunasi semua, sebelumnya mereka tidak mau.

Kemudian kita juga membentuk kontrak atau kerja sama dengan cabang-cabang olahraga untuk membuat yang selama ini tidak ada dan kami lengkapi untuk kebutuhan memang persyaratan dari *World Anti-Doping* yaitu *APMU/Athlete Passport Management Units* sehingga di mana pun atlet itu bisa membuka *website*, ada modulnya, ada ininya, aplikasinya yang harus dilakukan dan selanjutnya ini termasuk juga kami harus melakukan bagaimana pelatihan DCO, kita selama ini telah melakukan pelatihan DCO. DCO itu singkatan daripada *Doping Control Officer* kalau BCO itu adalah *Blood Control Officer*. Karena saat kalau pengambilan sampel dari urine cukup DCO tapi kalau *Blood Control Officer* itu memang ada tenaga kita yang khusus dan kita sertifikasi.

Sebagaimana pada saat PON kami melakukan pelatihan karena kami pada awal kepengurusan menghadapi *event* besar nasional dan berdampak politis cukup besar yaitu Papua Pak, PON Papua. Kami *concern* juga untuk bagaimana ini sukses dalam pengawasan dopingnya *alhamdulillah* berjalan bagus pengawasan dopingnya dari 7 ribuan sekian atlet yang berkompetisi ada 723 sampel yang sudah kita kirim dan diterima oleh laboratorium Qatar dan ini semuanya sudah ini.

Kemudian kami lanjutkan lagi masalah internal di LADI. Dalam lebih kurang 6 bulan terakhir ada tiga kali pergantian pengurus Pak. Yang pertama di akhir Desember 2020 itu pengurus yang dari tahun 2017 sampai tahun 2020 setelah diperpanjang berapa bulan ya Pak ya karena ada *MoU* dengan PB Peparnas dan tidak tahu juga masalahnya apa diputuskan oleh kementerian diganti. Diganti kepengurusan baru setelah Januari sampai Juni Pak. Namun ini ternyata WADA mendapatkan laporan bahwa ketua dan sekjennya dianggap ada *conflict of interest* karena walaupun belum terjadi, dia adalah pengurus KONI dan pegawai Kemenpora kebetulan ya dan Sekjen Perbakin. Jadi WADA mengirim surat agar segera diganti dan jadilah kami menjadi pengurus harus menggerakkan karena *event* besar salah satunya PON ya pada saat itu dihadapi dan harus segera ada melakukan pengawasan. Jadi kami bekerja efektif itu mulai juli menghadapi apa saja yang harus kami lakukan.

Namun memang tidak ada serah terima jadi apa yang harus kami lakukan, kami harus mencari sendiri termasuk juga TDP. Kami mencari TDP ini betapa sulitnya karena TDP ini kami akhirnya kami dapat TDP yang direncanakan pengurus tahun 2021 dan implementasikan di tahun (suara tidak jelas) dan ini di tengah pandemi PPKM darurat yang begitu *strictly*. Juli-Agustus itu ketat sekali kami dan *alhamdulillah* kan ada *Zoom meeting* ada ini yang mengurus kami bisa tetap jalan mengurusi urusan ini.

Ada hal lain adalah kami sulit untuk mengakses sistem. WADA itu lembaga dunia yang cukup rapi Pak, dia mempunyai sistem untuk administrasi anti-doping administrasi manajemen. Ada untuk ADEL namanya, *Anti-Doping Education and Learning*. Semua ilmu itu kami semua tidak bisa akses termasuk juga yang tadi CCQ. CCQ itu *Code Compliance Questionnaire* yang harus selalu kami isi. Terus juga ada yang namanya CCC

itu adalah *Code Compliance Center* yang kita bisa tahu kalau ada kekurangan apa-apa mereka selalu aktif tapi tidak bisa kami mengakses.

Nah konsekuensi dari sanksi ini nanti sebelum ini kami akan melihat bagaimana *timeline* kami bergerak untuk mengurus ini tapi konsekuensi ini pelanggaran pengibaran bendera Republik Indonesia di *event* internasional yang ini perlu kami sampaikan, kami sangat sedih sekali dan telah menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia kepada Bapak Presiden, kepada semua olahragawan dan penggiat-penggiat olahraga untuk ini dan pada saat tim Indonesia bakal masuk final kami bersurat ke WADA dengan sanksi ini memohon kami telah memenuhi yang dia minta. Pada saat itu yang *24 item matters* itu belum keluar Pak, belum ada.

Bahwa kami telah memenuhi-memenuhi ini dan kami bersurat kepada WADA diperkuat lagi Pak Gatot pada saat itu sebagai masih Sesmen ya Pak? Bersurat ke WADA 1,5 hari, 2 hari sebelum Indonesia melakukan final Thomas Cup agar kami diizinkan bilamana Tim Thomas ini menang diizinkan Indonesia Raya dikumandangkan dan merah putih dikibarkan. Tapi ini hanya dikabulkan Indonesia Raya yang boleh dikumandangkan. Inilah kami sedih sekali, pilu rasanya kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi dengan ini, sedih sekali kami. Pada saat itu juga kami, saya masih dengan tim saya masih di Papua sedang mengurus menyelesaikan masalah doping PON yang kami harus awasi juga ketat pelaksanaannya karena ini kan dilaporkan terus ke WADA, inilah.

Jadi yang kedua Indonesia tidak diperkenankan untuk menjadi *event-event* internasional atau regional kecuali *event* yang sudah di-*deal* sebelumnya. Ini untuk ke depannya ini sampai sanksi ini dicabut. Kemudian kita juga tidak bisa menjadi pengurus lembaga internasional yang berkaitan anti-doping. Jadi hak kita untuk dipilih menjadi hilang dan yang keempat adalah aktivitas kami dalam melaksanakan pengawasan anti-doping tetap dilakukan tapi di bawah supervisi JADA (*Japan Anti-Doping Agency*) dan ini kami sudah menandatangani *MoU* per 1 November kemarin untuk sebagai kalau tidak kan kita akan semakin sulit, jadi semuanya sudah kita penuhi.

Nah beginilah *timeline* persoalan sanksi ini agar bisa kita meluruskan dan ini semuanya ada buktinya berupa email dan sebagainya. Jadi tanggal 3 September kami ingin melaksanakan tes doping untuk TDP, dari TDP itu sehingga kami mengirimkan ada setelah kami mendapatkan TDP atau *Test Distribution Plan* yang direncanakan 2020 untuk kami laksanakan karena dari sejak awal Januari itu hanya sedikit sekali yang dilakukan karena masalah pandemi ya, sulitnya persyaratannya dan sebagainya itu sulit. Kemudian juga kami masih tersisa sekitar 92 atlet lagi dari 192, kami telah melaksanakan 122 dan masih tersisa 70 pemeriksaan yang harus kami lakukan *quarter* 3 dan 4 dan kami melaporkan. Mereka minta koreksi lagi karena ada selisih ternyata ada sistem *administration management system* yang kita *input* itu ada kesalahan jumlah sehingga kami sekarang harus mengoreksi lagi dan itu sudah disetujui bolak-balik.

Kemudian tanggal 13 September 2021 LADI mengirimkan revisi kedua, terus kita aktif ini dan tanggal 15 September LADI mendapatkan ancaman sanksi. Ancaman ini bahwa karena program testing yang tidak efektif dan administrasi yang tidak efektif. LADI secara responsif bersurat terus kepada WADA sehingga WADA memberikan waktu 21 hari untuk melakukan koreksi dan pembenahan semuanya. Jadi kami mengebut kan waktu ini kami manfaatkan optimal. Karena pada saat ancaman ini kita apa kekurangannya dan sebagainya tidak ter-*state* dalam email itu.

Kami ber-email kepada Mr. Kazuhiro Hayashi beliau adalah Direktur Asia-Oceania dari WADA yang berkedudukan di Tokyo. Kemudian ada Mr. Kenny Lee beliau adalah *senior manager* untuk *testing-testing* dan berkedudukan di kantor WADA yang di Tokyo. Kemudian Miss. Ying Chui itu adalah *senior manager* untuk menghadapi *compliance* dari WADA yang berkedudukan di Montreal. Dari sana kami bisa tahu apa saja yang kami kekurangannya dan dipandu jadi kami lakukan. Jadi ditemukanlah permasalahan bawa *testing 2021* tidak sesuai dengan tes yang direncanakan di tahun 2020 itu dan kami benahi seperti yang mereka mau. Akhirnya disetujui lah jumlahnya menjadi 192 tes dan kita masih menyisakan sekitar 70-an tes yang belum kita laksanakan yang sudah kita laksanakan dengan yang kewajiban dan dia menyatakan bahwa TDP tahun 2022 harus segera dibikin dan pada saat itu memang kami sedang menghitung untuk 2022 untuk sebagai rencana kerja di 2022.

Tanggal 21 September LADI mengirimkan lagi revisi kepada WADA yaitu Direktur *Compliance* dari WADA yaitu Emanuele Simenoli ini. Kembali lagi kita disuruh untuk revisi. Terus ini yang surat ancaman yang tanggal 15 September hanya disebutkan bahwa TDP kita dan tidak efektif saja. Kami terus berkoordinasi secara aktif dengan WADA baik melalui email maupun *virtual meeting* terkait sanksi-sanksi ini. Memenuhi semua persyaratan dan kemauan WADA ini termasuk revisi TDP yang berulang kali dan yang lebih penting lagi kami ingin mendapatkan pengakuan untuk TDP PON ini dan *alhamdulillah* ini disetujui pada akhirnya setelah beberapa kali revisi-revisi karena ini kan sudah di ambang pintu untuk dijalankan implementasinya. Nah kemudian kami ikuti saran-saran mereka.

Tanggal 29 September LADI mengirimkan kembali revisi-revisi keempat TDP berupa TDP PON Papua yang pada akhirnya disetujui 4 Oktober. Revisi ini terus kami lakukan, yang kami mengejutkan pada saat kami sedang mengurus Papua masalah PON kita dikejutkan dengan LADI tetap menerima sanksi padahal apa yang mereka ini kami patuhi, mereka menyarankan berkoordinasi, berkonsultasi kami lakukan dan inilah yang sangat pilu kami karena kita sudah melakukan sesuatu. Jadi bukan sedih lagi yang pilu yang maksud kami, kami sedih sekali kami telah berupaya tapi mereka menjatuhkan sanksi demikian.

8 Oktober kami pengin tahu sebetulnya apa sih? Apakah cuma masalah TDP yang revisi-revisi ternyata kan mereka juga menyarankan untuk *meeting* dengan mereka. Kami *meeting* lagi lewat Microsoft ini, kami lakukan terus-menerus. LADI dan WADA menemukan banyak terdapat miskomunikasi

Pak kita yang terjadi antara keduanya. LADI juga menyatakan bahwa banyak pemberitahuan dan email dari WADA tidak jatuh langsung kepada kami yaitu kepada pengurus sebelumnya sehingga kami sering kali agak terlambat mengetahui kalau ada kabar-kabar selanjutnya. Bahkan informasi itu kadang-kadang media lebih tahu dahulu Pak lebih lucu begitu karena itu tadi.

Inilah akhirnya kan setelah kami ini mereka meminta nama-nama padahal kan kita telah mengatakan bahwa LADI sudah berganti pengurus, akhirnya mereka minta nama-nama kita yang selaku pengurus untuk email dan sebagainya dan inilah contohnya yang mereka ini untuk kami minta ganti ada nama-nama pada *slide* berikutnya ada lagi ini dan *database*-nya itu memang nama-nama pengurus lama, yang masih ada. Kemudian ini sebagai contoh bahwa kami menyelesaikan tagihan-tagihan dari lab Qatar. Kemudian juga kami ada seperti yang usaha-usaha kita untuk koreksi dan itu kita protes kita sampaikan semua ke Asian and Oceania RADU ini.

Untuk masalah TDP PON itu kami juga mendapatkannya agak terlambat dari panitia *ad hoc* PON yang berkewajiban menghitung jumlah atlet dan jumlah tes yang diperiksa tapi tetap kita bisa selesaikan dan akhirnya disetujui juga oleh WADA dan ini salah satu contoh kami kesulitan untuk membuka ADEL itu Pak. Jadi di sini ada yang namanya supaya kami bisa tahu ada masalah *internasional standard* apalagi yang kita harus penuhi dan sebagainya.

Nah ini yang surat tanggal 7-10 inilah surat aslinya pada *slide* selanjutnya itu. Pada tanggal 7 Oktober itu bahwa kita mendapatkan sanksi tanpa menjelaskan apa-apanya ya. Jadi WADA memang merespons surat LADI dengan sangat responsif melalui email maupun dan (suara tidak jelas) bahwa WADA menemukan *pending matter* lain. Jadi 8 Oktober itu kita berkorespondensi dengan WADA mendiskusikan alasan mengapa LADI tetap dijatuhkan sanksi padahal kita telah memenuhi apa yang mereka minta. Pada waktu yang bersamaan Pak Menteri Pemuda dan Olahraga juga mengirimkan surat kepada WADA terkait penjatuhan sanksi. LADI juga mengirimkan revisi ke-6 *distribution plan* untuk tahun 2022.

Pada 18 Oktober pengurus LADI baru mendapatkan *password* CCC atau *Code Compliance Center* dari pengurus tadi yang lama ini setelah berbagai upaya yang kami lakukan termasuk dari Pak Sesmen pada saat itu membantu akhirnya kami dapat satu *password* dan juga tanggal 20 Oktober kami juga mendapat kan ada *pending matter-pending matter* lain sebanyak 24 *pending matter* itu masalah-masalah lama semua yang terungkap dan memang hal-hal yang sifatnya fundamental termasuk organisasi kita yang tidak sejalan dengan yang diinginkan WADA termasuk juga masalah *budgeting* dan sebagainya.

Pada saat itu juga atas inisiatif dari SARADO, SARADO itu ASEAN-nya regional anti-doping yang berkedudukan Singapura menyarankan bahwa kita harus melakukan *meeting* dengan LADI, Kemenpora, kemudian Kementerian Keuangan mereka mengajak karena mereka menginginkan juga kita dalam aspek keuangan didukung, jarena mereka tahu semua dari

Singapura itu tahu semua apa yang kami rasakan di sini. Inilah yang terjadi. Jadi ini ada suratnya dari SARADO. Mr. Gobi ini. Mr Gobi ini banyak cukup baik sama LADI selama ini khususnya pada kepengurusan yang lama cukup intens dan dia tahu banyak tentang Indonesia.

Kemudian hasil rapat lanjutan dari yang dihadiri oleh perwakilan dari WADA yaitu Mr. Ying Chui. Beliau ini sangat baik dan ahli di bidang untuk penghitungan sampel-sampel doping, mereka sangat membantu kita. Mereka yakin bahwa mereka telah mengirimkan *corrective action report* ke akun CCC yang kami baru dapat *password*-nya Pak. Nah pada saat LADI membuka akun ini kami tidak menemukan *corrective action report* yang seperti yang dia sampaikan. Setelah berkorespondensi lagi mengirimkan mereka itu yang mereka kirimkan ternyata yang tahun 2019 Pak yang artinya sebelum kepengurusan kami dan ini mereka mengakui mereka salah dalam hal ini.

Mr Ying-nya ini itu ada kesalahan dan ini sebelumnya telah dikirimkan ke pengurus LADI sebelumnya tanggal 23 Juli 2019, ini jawaban emailnya, artinya peringatan ini sudah disampaikan ke pengurus lama. Dari hal tersebut yaitu ancaman sanksi sudah ada sejak tahun 2019 namun tidak ditindaklanjuti. Nah WADA belum mengirimkan *corrective action report* ke pengurus LADI yang baru. Di sisi lain bahwa LADI seharusnya mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan *corrective action* sebelum WADA menjatuhkan sanksi karena ada kesalahan mereka. Tapi kita tahunya belakangan, sanksinya sudah jatuh baru bertemu jadi kena. Jadi kami terus berupaya untuk ini.

Berdasarkan penjelasan WADA tersebut melalui email pada 30 Oktober WADA mengirimkan kembali 2019 kepada (suara tidak jelas) bukti bahwa mereka telah mengingatkan. WADA mengakui bahwa mereka melakukan kesalahan pada saat pengiriman *corrective action report*. Karena hal tersebut merupakan *output* dari WADA *continuous monitoring program* di WADA sudah tertata baik Pak. CCQ *Code Compliance Questionnaire Review* atau semacam audit yang mereka bisa lakukan setiap kita mengisinya dan ini yang kita baru bisa lakukan sekarang karena kami baru dapatkan.

Kemudian dari surat tersebut menjelaskan bahwa alasan LADI yang telah dihubungi 2 tahun sebelumnya. Sebagai info saja tahun 2017 LADI pernah di-*banned*, sama diberikan sanksi ya Pak pada saat menjelang Asian Games dan mungkin ini ada kaitan dengan itu karena ada *pending-pending matter* yang seharusnya diselesaikan sampai tahun 2019 yang tidak diselesaikan dengan tuntas, Pak Gatot tahu persis peristiwa ini. Jadi inilah yang disampaikan oleh mereka.

Nah kami upaya-upaya yang dilakukan untuk mempercepat pencabutan sanksi, kami berkomunikasi aktif LADI dibantu oleh KOI atau NOC, Kemenpora membentuk tim akselerasi untuk pencabutan sanksi WADA. Tim ini yang diketuai oleh Pak Okto selaku ketua beranggotakan dua dari NCO Pak Okto dan Pak Sekjenya ya Pak Feri Kono. Kemudian dari LADI dua orang, dari Kemenpora satu orang, dari cabor yang internasional

jadi dari bulu tangkis dan alat angkat besi. Jadi ada perwakilan daripada *stakeholders*, jadi ini yang telah dilakukan.

Jadi TDP kita yang 2020 sampai 2022 sudah disetujui tinggal kita implementasi. TDP kita tentang Pepernas juga sudah disetujui dan saat ini kami sedang melaksanakan doping di Pepernas. Jadi tim kami ada seharusnya saya hari ini juga sudah di sana karena ada undangan dewan mestinya jadi tim kita yang di sana sudah menjalankan implementasi pengawasan doping untuk Pepernas, sudah berjalan ini. Semuanya ini *under* yang untuk Pepernas kita dalam supervisi Jepang. Mereka tidak datang tapi melihat laporan yang *input* yang kita masukkan termasuk foto-foto yang kita lakukan setiap pengambilan sampel.

Seluruh *pending matter* ini telah kita lakukan perbaikan. Walaupun ada beberapa yang masih belum tuntas masalah organisasi penggantian beberapa pengurus seperti yang diinginkan mereka tapi ini mereka sudah paham bahwa kita butuh waktu. Saran-saran ini telah kami lakukan semua ada dan pada rapat tanggal 2 November ini rapat kita dengan yaitu antara LADI, SARADO itu ASEAN Anti-Doping, kemudian dari Asia-Oseania dengan Jepang dan WADA dari Montreal juga hadir. Mereka memaparkan apa kewajiban-kewajiban yang harus terpenuhi tapi kami juga memaparkan apa juga yang *missed* komunikasi yang kita sampaikan sehingga mereka akhirnya mengakui bahwa ini menjadi bahan *review* dari mereka Pak ya dan juga Pak Raja Okto juga hadir pada saat itu dari Georgia dia hadirnya dan dia juga menyampaikan dari hasil-hasil pertemuan dia dengan Mr. Oliver Niggli dari Dirjen WADA di Montreal.

Ini terus berproses Pak dan semua kewajiban-kewajiban kita khususnya masalah uang yang juga uangnya tidak banyak tapi ini menyebabkan kita menjadi, semua sudah kita lunasi Pak bahkan kita sudah mendapatkan pernyataan dari mereka sudah tidak ada lagi tunggakan kecuali yang *current* yang saat ini kita pemeriksaannya belum ditagihkan Pak. Saya kira ini yang poin penting. Secara responsif email menyatakan bahwa LADI diminta untuk melakukan penyesuaian masalah lagi dengan penjelasan sebagai berikut. Selama periode di sanksi LADI harus disupervisi oleh JADA sebagai *mentoring*. Kita ini terus berkomunikasi, kita laporkan semua. Selama kalau ada orang dari JADA yang datang ke sini menjadi beban kita Pak, *travelling*-nya dan sebagainya ada tarif-tarifnya sudah dipublikasikan dan sudah kita laporkan kepada Kemenpora untuk menyiapkan anggarannya.

Ada kewajiban-kewajiban yang lain bahwa tes pelaksanaan PON sudah kita cek sampai tadi bawa sudah semua sudah sampai di Qatar dan kita tinggal menunggu hasilnya saja Pak nanti masuk dalam sistem nanti. Yang terkait dengan kinerja, anggaran, organisasi serta edukasi. Edukasi ini menjadi penting karena *password*-nya juga kami baru dapat dari *password* ADEL itu baru dapat karena di sanalah ilmu anti-doping untuk kami meningkatkan *capacity building* daripada petugas-petugas kami. Kemudian kami juga membuat berbagai macam SOP yang sesuai yang selama ini tidak pernah ada Pak. Kami bikin semua SOP-SOP nya dan semuanya sudah kita kirim ke JADA, mereka sudah *review* semua.



Pada saat ini beginilah bentuk organisasi daripada LADI, jadi ada ketua, ada sekretaris. Nah sebetulnya kalau kita sudah diskusi dengan para mereka ada beberapa yang ini tidak seperti yang mereka inginkan karena ini masih menjabat pejabat aktif, ini tidak boleh Pak. Ternyata ini kita (suara tidak jelas) salah satunya begini. Ini saat ini sudah diubah dalam proses ya Pak jadi tidak ada lagi. Pak Gatot *alhamdulillah* pas dia pensiun kami lagi mengubah ini sehingga tetap kami butuhkan sebagai pembina pengawas kami, *mentoring* ya dan itu yang beruntung buat kami. Kalau yang lain berubah semua itu, jadi saat ini sedang diproses ya Pak Gatot ya termasuk juga kami di tim ini.

Kami di saat yang kami kalau ibarat kita selaku orang kampung di saat kapal kami sedang diguncang badai dan angin yang kencang ombak yang besar, dua direktur kami mengundurkan diri padahal saat kami sangat butuh sekali. Saat ini kami relatif menyelesaikan permasalahannya hanya bertiga, relatif Pak. Jujur harus kami katakan luar biasa kami, harus memperjuangkan masalah ini. Karena dua direktur kami yang justru penting seperti edukasi dan pengujian ini mengundurkan diri di saat kami dapat ancaman Pak. Orang punya hak untuk mengundurkan diri ya kami tidak bisa menolak dan mereka banyak tahu permasalahan-permasalahan. Jadi inilah yang.

Nah kelembagaan LADI yang diinginkan WADA itu bahwa seluruh pengurus harus *full time* tapi ini tidak harus juga. Karena setelah kita membandingkan dengan pengurus seperti Muangthai. Muangthai memang Thailand itu paling banyak yang tenaga *full timer*, Jepang itu enggak sampai 50% tenaga *full timer*. Terus lagi Korean itu mungkin sekitar 40% yang pegang tenaga *full timer*. Jadi kita yang penting ada yang *full timer*, ada yang *part timer*. Sehingga semua itu diminta jabatan kita pekerjaan kita di luar kepengurusan LADI dan itu harus ada buktinya. Seperti saya pensiunan, pekerjaannya apa saja yang lain sehingga diharapkan bisa dan ini sudah kita kirimkan Pak ke sana.

Kemudian masalah *budgeting*. *Budgeting* ini kita harus punya *budget* sendiri dan untuk tahun 2022 sudah kami kirimkan seperti apa rencana kerja kami mulai *budgeting*-nya dan *budgeting* kami selama ini perlu kami sampaikan adalah berdasarkan kalau kami membuat rencana kerja nanti anggarannya dimasukkan di Kementerian Pemuda dan Olahraga khususnya di Deputy 4 Olahraga Prestasi dan di Asdep Tenor ya tenaga keolahragaan. *Just info* saja di tahun 2021 ini anggaran kami itu sekitar 7 miliar dan saat ini baru terpakai mungkin sekitar 5 miliar untuk pemeriksaan tes doping pelatihan dan sebagainya dan inilah. Di tahun 2020 setelah kami melaporkan ke Bapak Presiden tentang kejadian ini dan kami di-*support* penuh kalau butuh anggaran sampaikan.

Karena di tahun 2020 *test distribution plan* yang kami buat itu luar biasa besarnya Pak dibandingkan ini karena memang banyak sekali kita ingin memenuhi apa yang diinginkan oleh WADA, sehingga jumlahnya mencapai 580 ya Ibu ya? Ibu Dessy, 580 *testing* tapi jumlah atletnya enggak sampai sebegitu karena ada satu atlet yang diperiksa dua kali. Jadi kalau kita rata-

rata memeriksa itu kami ada semacam *real cost unit cost*-nya itu sekitar hampir 7 juta lah mulai dari biaya *kit*-nya, biaya orang yang ambil sampel, biaya mengirim ke sana lebih kurang itu jadi untuk ini saja.

Kemudian kami banyak akan mengadakan pelatihan-pelatihan dan sosialisasi karena target kita adalah *zero doping* di semua olahraga prestasi maupun di olahraga rekreasi Pak nanti ke depannya. Banyak sekali yang termasuk juga *capacity building* untuk pendidikan daripada petugas-petugas kita sendiri. Saya kira ini. Kita saat ini telah mempunyai *website* sendiri yang sebelumnya dikuasai oleh pengurus lama ya. Kami akhirnya mendesak karena ini selalu diingatkan oleh WADA. *Website*-nya karena *website* yang lama di pengurus lama itu kan seperti beku saja Pak tapi kita enggak bisa mengambil alih akhirnya lewat bantuan Pak Sesmen pada saat itu ya kami bisa membuat *website* dan itu sudah terpenuhi.

Jadi inilah upaya-upaya kami yang sudah kami lakukan jadi terus kami akan lakukan semuanya dan kami mohon bantuan Bapak/Ibu sekalian bahwa lembaga anti-doping ini apa pun nanti ya dinamakan karena pada saat kami juga konsultasi berapa bulan lalu dengan Kementerian PAN RB bahwa nama lembaga ini masih ganjalan ya betul ya Pak ya pada saat itu. Apa pun, apakah namanya *Indonesia Anti-Doping Agency* atau apa itu buat kami tapi yang penting kita bisa tetap mengadopsi dan mengimplementasikan apa yang menjadi kewajiban internasional pemerintah. Intinya WADA *code* ini bisa kita lakukan ini jadi.

Untuk itu banyak juga yang menyarankan kalau bisa LADI itu di bawah Perpres sepertinya juga KOI, NPC, ataupun KONI ya Pak ya karena kalau di bawa Kemenpora banyak sekali kesulitan-kesulitannya termasuk menentukan honorarium ya Pak. Mohon maaf kami sampaikan mungkin di medsos beredar banyak Pak kami lihat bahwa pengurus LADI itu honorinya sangat kecil bahkan nilainya, itu di medsos banyak. Bukan dari kami tapi Pak dari pengurus lama ya dan ini salah satunya kalau kita kelembagaannya diperkuat mungkin bisa dipikirkan.

Kemudian operasional kita bisa independen. Jadi ini yang perlu kami ingatkan untuk itu kita juga tidak ada *conflict of interest* dalam hal kepengurusan dan *budgeting* dan dukungan pemerintah sepenuhnya serta yang paling penting adalah kita bisa dimasukkan dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional di nomenklaturnya sehingga memudahkan rekognisi kita itu diakui dan itu dipertanyakan dalam pertemuan kemarin. Bagaimana rekognisi LADI itu? Dia menguji ya Pak.? Pak Gatot bisa menjelaskan nanti Saya kira ini saja dari kami, kami sangat berterima kasih sekali bisa menyampaikan semua ini dan ini kami sampaikan apa adanya dan semuanya kalau memang ini semuanya didukung dengan data-data dan kami kira ini saja.

Dengan ucapan *alhamdulillah rabbil alamin*.

*Wabillahittauhiq wal hidayah.*

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih dr. Musthofa Fauzi Ketua Umum LADI.

Mungkin ada tambahan, silakan Pak Gatot. Karena tidak hanya sekarang ini yang lalu juga kan pernah disanksi. Silakan Pak Gatot.

**DEWAN PEMBINA LADI (Drs. GATOT SULISTIANTORO DEWA BROTO, M.B.A.):**

Baik terima kasih Pak Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Yang terhormat Bapak/Ibu Pimpinan Rapat RDP.  
Kemudian Bapak/Ibu para Anggota Dewan Komisi X.**

Syukur *alhamdulillah* kami ingin menambahkan dalam kesempatan ini tapi sebelumnya perlu kami sampaikan saya sejak per tanggal 1 November *alhamdulillah* sudah tidak lagi sebagai Sesmenpora karena masa tugas saya hanya sampai dengan tanggal 31 Oktober. *Alhamdulillah* itu sudah terlampaui dengan baik. Terima kasih. Tetapi kami diminta oleh Pak Menteri untuk menjadi TA beliau dan *alhamdulillah* juga tentu saja *full team* akan saya sampaikan saya bekerja dengan *all out*.

Yang pertama ingin kami sampaikan adalah bahwa tadi dr. Musthofa mengatakan ini yang kedua kalinya dan hampir yang ketiga kalinya. Jadi yang pertama kali kami itu dapat surat sanksi tanggal 22 November 2016 dan itu baru dicabut tanggal 17 Februari 2017. Kalau ditanya sebabnya apa? Sebabnya hampir mirip tetapi kalau ini lebih berat yang tahun 2021. Waktu itu karena setiap komunikasi kalau kali ini kan oleh dr. Musthofa dan teman-teman direspons. Kalau saat itu apa pun suratnya WADA tidak pernah direspons dan pada saat itu saya menjadi Deputi 4 kemudian saya ambil alih meskipun sebetulnya tidak boleh Deputi 4 saya ambil alih dan *alhamdulillah* dalam waktu 2,5 bulan itu bisa selesai. Tetapi kalau saat itu tidak selesai karena pada saat yang bersamaan WADA itu memberikan sanksi kepada Rusia yang notabene Rusia sampai sekarang belum dicabut sanksinya. Kalau tempo hari itu tidak dicabut, *naudzubillahimindzalik* itu Asian Games enggak ada cerita saat itu, itulah sanksi yang pertama.

Hampir sanksi yang kedua itu muncul tanggal 13 Mei 2021. Jadi saat itu malam takbiran ya tengah malam kami dapat surat dari Montreal karena pagi hari di Montreal surat itu ditujukan kepada Pak Menpora karena tadi Pak Musthofa tadi menyampaikan karena ada rangkap jabatan di LADI dan kami dikasih waktu sampai tanggal 31 Mei besok paginya karena suasana Idul Fitri sampaikan pada Pak Menteri ya sudah Pak Ses itu dipenuhi saja begitu kita

ikuti dan *alhamdulillah* tanggal 31 Mei kami respons bahwa kami akan mengubah. Inilah menjadi cikal bakal kenapa kemudian per 30 Juni itu ada SK baru karena hampir sanksi dari WADA. Jadi kalau sampai waktu itu Indonesia abai enggak ada cerita kemarin Greysia Polii dan Apriyani pada saat tapi untung *alhamdulillah* tidak terjadi, pada saat dapat medali atau Olimpiade itu enggak ada cerita Indonesia Raya dan merah putih tapi *alhamdulillah* itu bisa melewati.

Kami dalam kapasitas Kementerian itu hanya merespons seandainya surat itu ditujukan kepada Pak Menpora karena mungkin Prof. Djohar masih hafal dengan FIFA ya Prof. Jadi kami tidak boleh masuk terlalu dalam, jadi kami hanya merespons kalau itu yang dikirim adalah kementerian. Sama dengan LADI arahan Pak Menteri juga sudah *clear*. "Pak Gatot kamu hanya masuk kalau itu surat ditujukan pada saya, kalau enggak begitu kamu *support* saja LADI atau kalau perlu kamu bantu buat surat tapi yang penting yang tanda tangan adalah Pak Musthofa"

Kemudian yang ketiga adalah tadi disampaikan oleh dr. Musthofa dan saya yakin Bapak/Ibu akan membantu sekali ada permintaan dari WADA. Kalau di Undang-Undang SKN yang ada itu kan lembaga anti-doping tidak disebut hanya tidak boleh doping, tidak boleh doping di pasal 82 dan seterusnya. Nantinya itu kami mohon bantuan Bapak/Ibu sekalian pada saat sekarang pembahasan SKN baru berlangsung itu harus menyebut langsung. Entah entitasnya apa itu belakangan yang penting undang-undang itu mengakui keberadaan entitas dari lembaga anti-doping entah badan anti-doping, mereka minta seperti itu.

Kemudian yang berikutnya adalah tentang Bapak/Ibu pasti tanya tanggal 19 November ada Mandalika World Superbike, kemudian tanggal 16-21 ada Indonesia Master di Bali bulutangkis, Indonesia Open tanggal 23-28 November, BWF World Tour Final tanggal 1-5 Desember dan Indonesia International Challenge tanggal 1-7 Desember di Bali, bagaimana dengan nasib dari *event-event* internasional tersebut? Tadi betul yang disampaikan oleh dr. Musthofa memang sesuai dengan ketentuan dari WADA *code* kita tidak boleh menjadi tuan rumah tapi *alhamdulillah* karena kami komunikasi intens, oke lah Indonesia bisa.

Hanya saja kami jujur di forum ini yang kami masih khawatirkan itu seandainya karena potensi kalau Mandalika mungkin agak kesulitan ya, tapi kalau di Indonesia Open itu potensi Indonesia untuk menjadi juara, entah itu di tunggal putra, tunggal putri, ganda putra atau ganda putri itu potensinya besar. Ada kemungkinan ini kami akan kesulitan untuk selama itu belum dicabut untuk tidak bisa mengibarkan bendera putih, kami harus di forum ini harus jujur menyampaikan.

Kemudian yang berikutnya adalah strategi sudah ditempuh pendekatan tadi sudah sampai dr. Musthofa, Ketua Umum KOI sudah pendekatan langsung ketemu dengan Presiden WADA, dengan Dirjen WADA pada saat di Eropa. Kemudian LADI kami *backup* sepenuhnya juga sudah, baik virtual bicara dengan WADA, SERADO, dan juga dari JADA Dan kemudian kami

juga menyisir sesuai dengan arahan Pak Menteri, jangan sampai nanti ada masalah yang tersisa kayak tagihan-tagihan ke lab Qatar, lab Bangkok itu sudah dibayarkan semua dan bahkan yang terakhir untuk kedatangan JADA supervisi itu tadi disampaikan dr. Musthofa itu dibayar sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia. Ini DP-nya juga sudah dibayar melalui Kemenpora.

Yang terakhir dari kami sebagai bentuk kepedulian masalah anggaran pada saat dua kali pertemuan dengan WADA dan JADA ya itu Pak Dirjen Anggaran Pak Isa juga hadir karena mereka pengin tahu *stakeholders* yang ngurusin anggaran ini komit enggak sih tentang masalah LADI. *Alhamdulillah* di dua sesi pertemuan secara *Zoom* itu Pak Dirjen hadir.

Demikian tambahan dari kami, mohon maaf kalau ada kekeliruan.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Bagaimana masih ada tambahan? Cukup? Bapak/Ibu, saya kira ini PR-nya dilempar nanti ke Panja Undang-undang-undang SKN karena ini menyangkut pihak lain, pihak WADA. Jadi saya kira segera mesti disebut entitas anti-doping Indonesia nanti sebutannya apa terserah, *monggo* di undang-undang. Tetapi kalau ketentuan dari WADA ini berarti harus independen juga? Harus independen ya?

**DEWAN PEMBINA LADI (Drs. GATOT SULISTIANTORO DEWA BROTO, M.B.A.):**

Izin, pada saat Pak Dirjen hadir itu Beliau sempat (suara tidak jelas) menanyakan ini. Independennya mohon diperjelas disampaikan, independen ini dari aspek keuangan silakan boleh dari negara, tetapi kalau dari segi profesi itu nantinya bukan saat ini ya, nantinya itu *long term*-nya harus betul-betul *full* yang bekerja untuk itu. Kalau anggaran itu yang independen, mohon maaf ini itu yang tidak dari negara hanya Thailand karena Thailand itu LADInya dibayar dari lotre dan akhirnya di-*banned* gara-gara dibayar dari lotre.

**KETUA RAPAT:**

Tapi di-*banned* juga nanti Pak?

Saya kira cukup, silakan selanjutnya *monggo* Bang Rano Karno.

**F-PDI PERJUANGAN (RANO KARNO, S.IP.):**

Terima kasih Pak Ketua.

Yang saya hormati dr. Musthofa Fauzi.  
dr. Rheza Maulana.  
drg. Dessy.

Saya mendengar paparan tadi Mas Musthofa geleng kepala saya, bahasa betawinya *ente kena ketempuan* ini bahasa betawinya. Namun seakan-akan masyarakat melihat Anda ini seakan besar sekali. Untuk itulah makanya saya pribadi minta sebelum konsinyering Pak, mengundang Anda supaya kita paham apa yang terjadi, apa sesungguhnya yang terjadi. Kalau saya baca masalah internal saja bingung saya, bagaimana waktu penyerahan masa jabatan enggak ada serah terima itu, ini organisasi apa dan Mas Musthofa mau lagi, kalau saya, saya mundur. Cuma sekarang Bapak tinggal bertiga karena yang dua katanya sudah mundur, sementara yang dua ini orang lama.

Saya tidak ingin memperberat Pak karena kita ingin menyelesaikan segera masalah ini, cuma tentu saja kami harus tahu apa yang terjadi, sehingga apa yang bisa kami dukung. Kalau Anda tadi menyampaikan anggaran 7 miliar, sementara organisasi seperti ini terlalu murah 7 miliar, mungkin Anda enggak punya gaji kali, *ngapain* kerja tanpa gaji, dedikasi? Enggak bisa Pak, itu bukan profesional, sementara di sini bahasanya profesional. Nah jadi kita akan dukung Pak Gatot karena kita berhubungan internasional ini, kita berhadapan dengan internasional yang tidak mau, tidak mau harus kita *support*.

Jadi memang konsinyering hari ini penting, kalau menurut jadwal yang kami terima laporan LADI ini adalah tanggal 11. Saya minta didahulukan supaya nanti konsinyering kita paham apa yang ingin kita mau bicara karena kita ingin memfokuskan masalah ini, supaya ini Indonesia bangkit bisa terasa Pak. Kita masih punya Bajo, kita masih punya Borobudur yang mungkin ada *event* internasional nanti, bukan hanya Mandalika. Mandalika kita bendera Indonesia tidak berkibar enggak apa-apa karena kita enggak mengikut Pak, iya kan Indonesia kan enggak ikut balap tapi apakah enggak boleh bendera Indonesia berkibar di area itu, ini kita juga mesti tahu ini. Lagu Indonesia Raya dinyanyikan tentu kalau kita menang kan Pak, tapi kalau kita sebagai tuan rumah apa enggak boleh? Ini juga kita mesti tahu.

Besok Mandalika, kan Indonesia tuan rumah, apakah di area sirkuit enggak boleh ada bendera Indonesia? Kalau memang enggak boleh kita dikasih tahu, jadi kita bisa menjawab kalau ada pertanyaan. Untung kemarin bendera PBSI dibawa Pak, coba kalau enggak saya khawatir mungkin maaf bahasanya singlet digantung kali waktu Thomas Cup iya kan. Untung bendera PBSI dibawa atau sudah tahu cuma enggak menyangka menang ya Mas, tahunya menang, untung ada bendera PBSI, coba kalau enggak ada bendera PBSI kaos singlet mungkin dikibarkan untuk mengiringi kemenangan Thomas Cup.

Jadi Pak Ketua, ini kita harus dukung, prioritas pertama konsinyering untuk ini. Di sini ada Pak Sesmen setelah Beliau pensiun lebih gemuk berarti

lebih *happy* Beliau. Ini kita bisa menjadi tim yang kuat ini Pak, tinggal kita titipkan ke Ibu Karo ini. Tolong anggarkan yang benar Mas, jangan 7 miliar saya tahu Anda enggak punya gaji ini, ini sudah tahu begini, ajukan segera, ini akan prioritas kita dukung.

Mungkin itu Pak Ketua, terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Selanjutnya silakan Bang Andreas, eh Ibu, Bang Andreas silakan enggak apa-apa. Ibu Hetifah dahulu atau Bang Andreas dahulu saja.

#### **F-PDI PERJUANGAN (Dr. ANDREAS HUGO PAREIRA):**

Baik, terima kasih Pak Pimpinan.

#### **Teman-teman Komisi X.**

**Pak Gatot saya mau sebut Pak Sesmen ini, Pak Gatot.  
Pak dr. Musthofa Pimpinan LADI.**

Tadi mendengar apa yang Bapak jelaskan terus terang saya terenyuh juga begitu. Artinya seperti tadi Bang Rano sampaikan Bapak kelimpahan persoalan begitu dari masalah sebelumnya. Saya terlihat ada satu catatan di sini ada soal upaya-upaya di halaman 32 itu ada satu poin yang menurut saya penting dan menarik dan seharusnya ini menjadi perhatian kita begitu. Di halaman 32 poin 9 LADI harus terus berprogres dan berusaha untuk menjadi lembaga yang independen dan bebas dari konflik kepentingan. Saya kira ini penting, apa artinya ini sebelumnya itu tidak independen dan banyak kepentingan yang bermain di situ, yang ada di situ. Nah ini sebenarnya juga ini karena kebetulan keluar begitu, karena kebetulan keluar internasional dan kemudian terbuka ke publik.

Dalam arti bahwa masalah di dalam, ini kan masalah internal sebenarnya karena ada keterkaitan dengan dunia internasional, keterkaitan dengan kepentingan nasional, semua orang akhirnya tahu bahwa ada persoalan di dalam tubuh internal kita. Jadi borok di dalam itu kelihatan keluar begitu, akibat dari apa yang apa yang Bapak tulis di sini. Mungkin banyak hal yang tidak apa, terlalu banyak campur tangan, terlalu banyak konflik kepentingan yang ada di situ. Mungkin Pak Gatot mungkin ini juga wajah olahraga kita, *in general*. Tapi selama ini karena mungkin kita tidak ada, tidak banyak keterkaitan dengan prestasi internasional sehingga tidak kelihatan, bisa kita tutup di sini, bisa kita sembunyikan di sini, tapi ini kan karena keluar, terbuka akhirnya jadi orang tahu begitu.

Saya kira ini pertama catatan ini tentu pelajaran serius buat kita, dalam arti keseluruhan. Kita tahulah ini kan baru tadi kami terima organisasi SIWO itu juga banyak menceritakan tentang banyak persoalan yang berkaitan dengan dunia keolahragaan kita begitu. Kebetulan kita lagi membahas Undang-undang SKN ini. Sekarang case yang konkret, yang faktual dan aktual apa yang terjadi dengan LADI ini. Saya kira kita harus sama-sama

menyalahkan diri kita, semua kita punya tanggung jawab di sini begitu karena kita mungkin anggap ini hal yang sepele begitu. Tapi yang namanya urusan organisasi ini mempunyai keterkaitan secara internasional dan jangan terlalu banyak urusan-urusan konflik kepentingan-kepentingan kita di dalam, ini kemudian mengikat kaki kita.

Saya kira Bapak kan kebetulan Bapak diberikan tanggung jawab di saat-saat terakhir begitu, tapi yang sebelum-sebelumnya juga meninggalkan ini juga mungkin karena soal gaji, soal apa hal-hal yang berkaitan dengan kompetensi mereka begitu yang seharusnya dijamin. Saya kira itu ya mau marah, marah ke siapa begitu, toh orang yang dimarahi juga mungkin punya pembelaan diri. Artinya marah dalam arti apa? Mewakili publik, kan publik marah ini, publik marah karena Indonesia Raya, bendera tidak dikibarkan, bendera saya kira dikibarkan pada saat itu, Indonesia Raya yang, bendera yang tidak dikibarkan, Indonesia Raya yang dinyanyikan pada waktu itu dan itu menyangkut kebanggaan nasional dan pantas publik marah karena mereka tidak tahu persis persoalan.

Saya di satu sisi bisa berterima kasih pada penjelasan Pak Dokter, tapi saya kira dari poin hari ini pelajaran serius buat kita bukan hanya urusan LADI Pak Gatot, tapi juga urusan semua bidang olahraga yang lain begitu. Artinya urusan olahraga secara keseluruhan, karena ini poin yang penting, independen dan konflik kepentingan karena terlalu banyak hal yang kemudian berkaitan dengan konflik kepentingan-konflik kepentingan politisasi dari apa, ya kami ini lembaga politik tetapi saya pribadi saya tidak mau terlalu banyak politisasi dalam dunia olahraga karena itu akan menghancurkan dunia olahraga. Apalagi ya kalau urusan dengan masalah kesehatan seperti ini begitu, ini pasti akan benar-benar menjadi mencoreng wajah kita sendiri begitu di dunia internasional.

Saya kira terima kasih banyak Pak Dokter sudah menjelaskan secara gamblang dari apa yang ini dan saya harap publik lihat semua ini bahwa kita janji kita mau memperbaiki ini begitu dengan serius begitu dan saya kira apa yang Pak Dokter sampaikan tadi kita akan mendukung di dalam regulasinya, termasuk di dalam undang-undang, perundang-undangan karena kebetulan kita lagi membahas soal di dalam perundang-undangan. Ini kita dukung ini dengan turunan-turunan konsekuensi dari undang-undang itu, dalam arti peraturan-peraturan yang akan mengikuti ini. Sehingga ke depan tidak boleh ada lagi hal seperti ini terjadi begitu. Saya kira dari hari ini tidak boleh lagi ada persoalan berkaitan dengan LADI, dalam hal ini tentu kita pegang regulasi yang nanti kita buat sebagai catatan kita bersama.

Saya kira itu Pimpinan, terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Bang Andreas.

Selanjutnya ya silakan mau lebih dahulu.



**PIMPINAN KOMISI / F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, MPP.):**

Terima kasih Pak Fikri.

dr. Musthofa.  
dr. Rheza.  
drg. Dessy.  
Pak Gatot.  
Ibu Yuni.

Tentunya kita semua teman-teman Komisi X masih ingat ya betapa terpukulnya kita pada saat kejadian Thomas Cup, saya juga langsung pokoknya WA-WA terus mengganggu Pak Gatot ini untuk minta penjelasan. Jadi kita memang tetap harus waspada ya beberapa potensi sanksi berikut yang mungkin masih bisa diterima oleh LADI, jadi yang paling penting tentu saja bagaimana kita bersama mencari jalan keluar terbaik, supaya sanksi WADA ini betul-betul bisa segera dicabut. Mungkin ini nanti Bapak Pembina ini dengan segala pengalaman dan *network*-nya begitu ya saya mohon, kami mohon untuk betul-betullah sepenuh hati membantu ya Pak yang, mudah-mudahan dengan waktu yang sekarang ada bisa mendampingi Pak Dokter Musthofa dengan lebih intensif lagi.

Jadi apa pun alasannya begitu ya saya kira ke depan ya hal seperti ini harus dihindari lah begitu ya saya kira miskomunikasi yang terputus antara WADA dengan LADI, kemudian juga antara pengurus lama ke pengurus baru yang tadi kita sudah dengar semua ya, walaupun tampaknya ini hal yang konyol atau bagaimana ya tapi ya itulah realitanya bagaimana misalnya tadi teman-teman pengurus baru tidak bisa mengakses sistemnya WADA ya dan *password* tidak diberikan dan sebagainya, ini juga sesuatu yang saya kira menjadi bahan pembelajaran kita.

Ke depan LADI juga saya pikir sebaiknya begitu ya kan kita juga punya banyak orang begitu ya yang bisa *men-support*, jadi harus lebih transparan, bukan transparan ya, bukan sekedar transparansi tapi apa adanya lah Pak Musthofa. Jadi andaikan nanti ada hal yang terkait dengan persoalan kemampuan diri kita di dalam organisasi, butuh orang *full time*, apa bicara apa adanya saja lah begitu ya. Jadi kita dengan begitu juga orang bisa membantu, saya susah menyatakan hal ini karena memang pemerintah itu bagaimanapun walaupun LADI ini independen, pemerintah memang perlu mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya begitu. Jadi jangan sampai pemerintah menganggap semuanya berjalan baik, padahal ternyata banyak hal yang masih harus dibenahi.

Tentunya pemerintah juga harus berarti dengan demikian begitu dengan institusi ataupun badan-badan lembaga yang ada kaitannya dengan bidang keolahragaan ini mungkin saya yakin Pak Menteri sekarang juga menjadi lebih *aware* dan harus, mungkin lebih proaktif lagi begitu ya menanyakan situasi yang ada dan tentu saja keinginan LADI untuk menjadi lembaga independen dan profesional dan juga dicantumkan nomenklaturnya di dalam Undang-undang SKN yang baru ini akan kami dukung dan saya juga

pikir iBun Yuni di sini hadir ya. Jadi masih bisa *men-support* pendanaan, mudah-mudahan tahun depan naik ya karena 7 miliar pastinya enggak cukup begitu ya jika akan ada *testing development plan* yang bagus dilaksanakan dan juga tidak kalah penting edukasinya itu.

Jadi ini kan yang sebenarnya tidak kalah pentingnya kan, bagaimana masyarakat tahu apa itu anti-doping, apalagi anti-doping juga sekarang berubah-ubah aturannya dan mungkin semua cabang juga harus mengerti di bidangnya sendiri, ini masuk kategori doping atau tidak begitu. Jangan sampai nanti konyol lagi begitu karena dia pikir sekarang ini aturan yang lalu itu boleh, ternyata yang sekarang sudah enggak boleh. Jadi berarti kan edukasi juga sangat penting dan membutuhkan *support* anggaran ya Ibu yang.

Juga nanti bagaimana usulan maksudnya LADI ini di bawah pengawasan siapa begitu, apakah sudah tepat di Kemenpora atau Kemenkes dan sebagainya, itu juga saya pikir kalau kami ya yang penting fungsinya itu bisa berjalan dan tadi masalah yang kita hadapi itu bisa selesai dan tidak terjadi lagi hal yang sama dan sekarang kita akan membahas ya malam ini ada 12 DIM dalam RUU SKN ya Pak yang telah terkait lembaga anti doping. Silakan mungkin kalau Bapak/Ibu dari LADI ingin juga memberikan masukan kepada kami tepatnya begitu ya hal-hal pengaturan dari lembaga anti doping itu kami tunggu.

Begitu saja Pak Fikri, terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**KETUA RAPAT:**

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Waktunya habis, sehingga diperpanjang berapa menit lagi ini? 30 menit ya, 30 menit.

**(RAPAT: SETUJU)**

Silakan selanjutnya Mas Mujib, silakan.

**F-PG (Dr. H. A. MUJIB ROHMAT, M.H):**

Terima kasih.

Ketua, Pak Wakil Ketua.

Anggota Komisi X yang ikut secara langsung maupun virtual.

Mas dr. Musthofa yang Fauzi dan di sini ada Mustafa yang Kamal Pak.

dr. Rheza ini.

Beliau sudah diantisipasi Pak, Pak Musthofa pakai baju itu, Pak Mustafa Kamal pakai baju dokter Pak.

drg. Dessy.  
Mas Gatot.  
Ibu Yuni.

Saya tentu hanya ingin mengatakan satu harapan dan satu keyakinan, harapannya jangan sampai ini terjadi lagi. Yang kedua, harapannya jangan sampai kayak oranisasi RT begitu, masa pergantian itu tidak dilaporkan. Ini saya kira, tadi saya setuju dengan Mbak Hetifah bahwa tidak bisa kita mengatakan kita enggak mengerti Pak Gatot karena itu saya kira saya tentu berharapnya jangan sampai ini terjadi dengan berbagai alasan tadi. Kita di sini miris sekali Pak Dokter Musthofa mendengarkan penjelasan Panjenengan itu, jadi miris betul seperti itu. Jadi karena itu kita tidak seperti halnya mirisnya ketika kita melihat kemenangan itu juga ditandai dengan pengibaran bendera.

Kemudian yang kedua, saya yakin karena kebetulan yang terpilih ini ya Al Musthofa, yang terpilih dan yang akan menyempurnakan. Kemudian yang satunya ini diterima oleh Musthofa juga, di sini yang nanti akan menyusun undang-undang ini karena itu Pak Mustafa Kamal saya yakin nanti akan *full* akan mengikuti Panja ini. Tapi pertanyaannya memang begitu Pak dr. Fauzi nanti kira-kira nomenklaturnya apa, kemudian akan disebut sebagai kira-kira di bawah pengawasan siapa? Karena dilihat dari sudut sekarang struktur yang ada mungkin ini semua ini Al Musthofa semua yang terpilih semua, cuma yang mundur itu memang yang enggak terpilih. Karena itu harus dicari, Pak Musthofa harus mencari orang lagi yang tadi disampaikan Ibu Hetifah perlunya untuk bagian edukasi.

Oleh karena itu saya kira bahwa kita akan menyempurnakan undang-undang ini, tolong juga Pak Musthofa menyempurnakan strukturnya ini, kemudian juga akan menyempurnakan SOP-nya nanti. Dengan demikian kita bareng-bareng karena kita punya kesedihan yang sama, kita punya keprihatinan yang sama dan kita akan menyelesaikan ini dengan sama. Tapi bahwa besok itu apakah dari Kemenpora atau dari Depkes karena bertiga ini saja semuanya dokter, itu mungkin yang paling mengerti dengan persoalan tersebut. Tapi tentu saja karena pemerintah diwakili oleh siapa pun nanti, saya setuju juga kalau tadi misalnya menyebut-nyebut rekomendasinya adalah itu ada Perpresnya. Karena kalau ada Perpresnya ya Pak Gatot pasti hafal betul, ini tentu kewibawaannya akan lebih tinggi. Kalau kewibawaannya akan lebih tinggi karena nanti diserahkan juga kepada Menpora, saya kira Ibu Yuni juga akan lebih takut kalau cuma kasih anggaran 7 miliar.

Saya kira begitu, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Mas Azam, Prof. Djohar, silakan Prof. Djohar.

**F-P. GERINDRA (Prof. DR. Ir. DJOHAR ARIFIN HUSIN):**

Terima kasih Pimpinan.

**Semua Anggota Komisi X yang saya hormati.**

*Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Tamu kita dari LADI hari ini yang sudah begitu heboh, ya kita memang prihatin situasi ini tadi sudah dijelaskan semuanya dan saya pernah duduk di LADI waktu saya di kementerian, suasana sangat bagus, saya pernah mengikuti kegiatan di Jordan, pertemuan LADI. Seyogianya orang-orang LADI itu mudah sekali berkomunikasi, mudah sekali, Saya heran kok bisa sampai kena sanksi ada apa, rupanya tadi masalah pengurus lama pengurus baru itu. Makanya wartawan banyak datang ke saya minta satu kata pun saya enggak mau keluar komentar, kita enggak boleh naik bendera itu banyak sekali WA minta ketemu, satu pun enggak saya komentari karena saya tahu permasalahannya, ada permasalahan administrasi.

Tadi disampaikan tidak efektif dan kemudian untuk ke depannya cari staf-staf yang *good in English*, jadi jangan ada staf yang tidak paham tentang bahasa Inggris. Jadi apa kata-katanya dia enggak mengerti, dia enggak tahu apa yang dikerjakan, jadi sangat mutlak, sangat perlu. Sekarang telah terjadi, kita enggak boleh lihat ke belakang, apa langkah ke depan hubungan baik dengan LADI, dengan WADA harus dikerjakan. Jadi kalau perlu datang ke sana, jumpa LADI dengan WADA, jangan NOC ke WADA, mereka tidak mau diintervensi. NOC pergi ke IOC minta bantu dan LADI pergi ke WADA, jelaskan masalahnya dengan memohon keringanan wewenang dan tidak akan, semua lah apa yang diminta diselesaikan, minta skornya dicabut.

Mudah kok orang sana, komunikasi sekali, fungsi sekali mereka di sana, orangnya mudah karena ini kita sudah keterlaluhan apa pun yang diminta enggak dikasih, apa enggak diberikan ya mereka merasa kita enggak dihargai, ya sudah gara-gara enggak dihargai itu ya kita enggak menghargai mereka, makanya Indonesia di-*banned* karena tidak menghargai WADA. Karena tidak ada satu pun permintaan WADA itu bisa kita penuhi. Oleh karena itu saya mau mengusulkan nanti sudah, nanti dalam teman-teman kita, wajib semua cabang olahraga itu berurusan dengan LADI, apakah sepak bola, senam. Mereka kegiatan itu untuk menjaga jangan sampai mereka itu terpengaruh.

Oleh karena itu tadi dianjurkan oleh teman-teman juga, ada edukasi dari pihak LADI kepada cabor-cabor, apa saja yang boleh dimakan, apa saja yang tidak boleh, apa saja minuman-minuman yang mengandung ini bisa karena tidak semua atlet kita, pemain kita, pengurus kita mengerti tentang ini. Ini tidak ada selama ini, saya Ketua PSSI saya enggak pernah LADI masuk ke PSSI, selama 4 tahun untuk menjelaskan. Ini perlu kita kembangkan itu dan kemudian saya berharap LADI ini sesuai dengan teman-teman dia independen bikin Keppres seperti LIPI lah, kedudukan LADI seperti LIPI

karena seluruh cabang olahraga atau bukan olahraga saja, yang lain pun bisa soal doping ini ke LADI. Jadi ditingkatkan levelnya Pak Gatot jangan keluar harusnya, jadi ketuanya di situ ya, ini yang harus kita ini kan.

Pengurus lama ini membuat Indonesia jatuh ini apa sanksi untuk dia, ini nama Indonesia dihancurkan oleh mereka kok tidak ada sanksi apa pun, seenaknya begitu kan. Merah putih tidak boleh dikibarkan, Indonesia tidak menjadi tuan rumah. Ini kan sanksi yang sangat berat, kok yang membuat kesalahannya kalau sudah tahu kenapa tidak ada sanksi, kalau perlu diseret secara hukum, siapa yang menindak ini barangkali kementerian lah yang paling tahu, siapa yang paling berhak menghukum mereka, jangan dibiarkan begini. Sudah di sobek-sobek harga diri kita ya negara kita enggak boleh menjadi tuan rumah ini kan penghinaan yang luar biasa. Yang membuat kesalahan harus dihukum, apa sanksinya ya terserah tapi musti ada sanksi jangan dibiarkan begitu saja.

Itu saja terima kasih Pimpinan, mohon maaf.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Selanjutnya Pak Kadafi, oh masih silakan Pak Ali.

**F-P. GERINDRA (ALI ZAMRONI, S.Sos.):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*  
Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi X.  
Pak Gatot dan Bapak-bapak dari LADI.**

Terima kasih Pak atas kehadirannya, begitu heboh perdebatan beberapa waktu yang lalu terkait dengan LADI tapi di sini kita harus bisa mengambil hikmah, bahwa ternyata kita baru tahu bahwa anggaran dari LADI ini cukup, cukup lumayan ya, cukup memprihatinkan kalau kata Bang Rano. Saya juga melihat kalau dari anggaran sebesar itu Pak Gatot mudah-mudahan bisa ikut membayangkan Pak Gatot ya, dengan tanggung jawab yang begitu besar apalagi sebetulnya tanpa usulan dari Prof. Djohar itu sendiri bahwa semua cabor itu harus berurusan dengan LADI, itu harusnya sudah terbayang berapa besaran anggaran yang dibutuhkan.

Karena semua cabor harus berurusan dengan LADI dan LADI punya aturan main yang sudah ditetapkan oleh WADA, ini kan sebetulnya mudah. Saya mendukung apa yang disampaikan Pak Djohar bahwa LADI datang ke WADA menjelaskan apa adanya, ini kan sebenarnya mudah Pak, seperti

Bapak marah ke anak saja. Ketika dijelaskan kemudian alasan yang rasional, saya rasa bisa lah diselesaikan. Apalagi kita menjadi sangat terpukul dengan keadaan kemarin, di mana kita menang tanpa ada bendera merah putih dan seterusnya.

Yang kedua, tentu ini menjadi catatan buat kita semua bahwa tolong semua aturan yang diberikan oleh WADA ditaati oleh LADI, tanpa ada satu pun yang dilanggar karena memang sudah seperti itu. LADI itu adalah WADA-nya di Indonesia di sini, khususnya untuk Indonesia, jadi aturannya betul-betul harus kita laksanakan Pak. Jadi kita berharap ke depan tidak terjadi seperti ini lagi, apalagi Pak Presiden menyampaikan investigasi ini, ini sudah perintah yang sudah luar biasa di mana atlet kita berprestasi tanpa ada penghargaan dan seterusnya, ini menjadi pukulan telak Pak untuk kita Pak.

Yang terakhir yang ingin saya sampaikan mudah-mudahan ke depan dalam *event-event* terdekat ini kita bisa tidak terjadi seperti kemarin. Saya tidak tahu apakah yang erdekat ini ada Superbike ini kita tidak informasinya belum kita dapat, 2 minggu lagi kalau tidak salah. Mudah-mudahan ke depannya LADI bisa menjadi yang ikut bersuara ya ketika ada momentum *event-event*, baik itu skala nasional maupun internasional.

Saya rasa itu Pimpinan.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Mbak Ratih, silakan.

**F-P. NASDEM (RATIH MEGASARI SINGKARRU, M.Sc.):**

Baik, terima kasih Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Yang saya hormati Pimpinan beserta seluruh Anggota Komisi X.  
Juga para tamu undangan kita Bapak/Ibu Dokter.  
Pak Gatot, Ibu Yuni juga semoga kita semua dalam kondisi sehat.**

Jadi langsung saja memang kita tidak bisa memungkiri begitu ya hal yang terjadi di LADI ini memang penyebabnya itu banyak sekali begitu, terkhususnya itu mungkin karena internalnya itu ya Pak yang, kurang lebihnya masalah pergantian pengurusan dan lain sebagainya. Memang jadinya masyarakat itu menurut saya wajar begitu kalau mereka itu marah, kecewa karena bendera kita tidak bisa dikibarkan kemarin itu.

Tapi memang saya juga senang mendapat penjelasan dari teman-teman di LADI semua begitu ya, yang di mana kita tahu bahwa ternyata upaya komunikasi kepada WADA itu sangat intens sekali yang dilakukan oleh kepengurusan yang terbaru *main*-nya hanya tiga orang ini yang dokter yang, itu luar biasa sekali menurut saya tapi memang sayangnya hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan dan juga seperti yang dijelaskan sebenarnya upaya korektif *action* yang dilakukan ini sebenarnya dengan WADA juga tektokannya cukup sangat respons sekali begitu. Tapi ya itu lagi kita masih belum puas begitu ya Dok ya kepayang begitu maksudnya dengan upaya yang dilakukan, apalagi sudah dikasih tenggat waktu pun selama 21 hari diupayakan secara maksimal tapi belum, harapannya tidak sesuai begitu.

Sebenarnya saya juga di satu sisi agak heran dengan *pending matter* yang sebenarnya sudah bertahun-tahun sebelumnya kok itu masih belum selesai oleh pengurusan LADI yang sebelumnya, sudah begitu tadi tidak ada serah terima jabatan, bahkan hal-hal kecil seperti *password* atau akun-akun lain yang itu tidak jelas juga serah terimanya itu kan sebenarnya hal yang lucu sekali, justru agak *childish* menurut saya, kenapa hal kecil seperti itu kok tidak dilakukan.

Jadi sebenarnya ini menurut saya merupakan pelajaran yang sangat mahal sebenarnya untuk kepengurusan LADI yang sekarang begitu ya, yang di mana ke depannya organisasi setingkat LADI ini, apalagi yang diakui begitu secara internasional dan di bawah kepemimpinan Pak Musthofa ini agar lebih *comply* juga dengan administrasi yang memang tertata dengan baik begitu. Lalu juga kami dari Fraksi Nasdem juga kami *support* begitu ya LADI untuk menjaga *compliance*-nya dengan apa-apa saja yang sebenarnya dibutuhkan oleh WADA begitu.

Namun tetap juga kita harus menjaga marwah kita sebagai LADI dan juga kalau bisa jangan terlalu submisif begitu yang karena tadi seperti yang disampaikan bahwa terjadi miskomunikasi dengan WADA, yang di mana WADA sendiri pun mengakui kesalahan tersebut, ada masalah sedikit komunikasi dan juga ini sebenarnya sedikit terkait masalah teknis, cuma saya agak gatel. Tadi melihat tek-tokan email-emailannya, di sini kan anggota LADI-nya sendiri masih menggunakan akun emailnya secara gratis begitu ya yang Yahoo, Gmail dan lainnya mungkin secara administrasi ini hal kecil yang menurut saya perlu diperbaiki karena kan sifatnya ini kita kan tenaga profesional begitu ya, maksudnya agar terlihat keprofesionalannya untuk hal-hal seperti ini.

Lalu juga kita sangat *support* sekali langkah cepat yang LADI lakukan yang berhasil menandatangani *MoU* dengan JADA. Karena JADA juga ditugaskan oleh WADA untuk membantu LADI untuk menyelesaikan masalah TDP periode 2021 ini dan juga tentu kami berharap ke depannya hal seperti ini tidak ada lagi dan semoga seluruh upaya yang dilakukan oleh LADI agar sanksi dari WADA ini bisa dicabut secepatnya dan bisa terlaksana dengan baik. Karena menurut saya ini dari dunia olahraga kita, kita itu sedang masa momentum, masa emasnya para atlet-atlet kita begitu. Jadi jangan sampai momentum ini dan juga semangat-semangat mereka ini jadi turun karena hal-

hal seperti sanksi-sanksi yang sebenarnya masih bisa begitu sebetulnya kita kita perbaiki begitu. Jadi semoga upaya yang sedang dilakukan cepat selesai dan berjalan dengan baik.

Mungkin itu saja Pimpinan, terima kasih banyak.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Silakan Mas Kadafi.

**F-PKB (Dr. H. MUHAMMAD KADAFI, S.H., M.H.):**

*Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Selamat sore.

Salam sejahtera kepada kita semua.

Terima kasih.

Pimpinan serta seluruh Anggota Komisi X.

Juga yang saya banggakan ada dari LADI yang diketuai oleh dr. Musthofa Fauzi.

Ini teman rapat tahunan saya, jadi kita di Pertamedika jadi setiap tahun itu bertemu, mengobrol bareng, cari makan yang enak bareng begitu.

**Kemudian juga ada Pak Gatot dan juga ada Mas Mimik.**

Ingin saya sampaikan bahwa kita harus memahami sekarang ini seluruh negara, seluruh dunia itu mulai menggunakan teknologi sebagai percepatan dari pengelolaan, baik itu bagi organisasi dan sebagainya. Tentunya mereka menginginkan kita patuh dengan data yang selalu kita berikan untuk *data base* yang mereka miliki, ini kan bicara *data center* yang, *data base* yang juga berkenaan dengan Desain Besar Olahraga Indonesia juga menginginkan punya *data base*. Inilah kenapa yang membuat WADAnya ya sedikit marah dari cerita tadi kan yang sertijab enggak jelas, kemudian enggak ada penyerahan tugas dan fungsi kerja selama ini. Kalau orang luar enggak memikirkan sampai sejauh itu begitu, ternyata sejauh itu permasalahannya.

Nah ini harus kita benahi bersama, baik itu tadi saya dengar berkenaan dengan WADA minta struktur organisasinya juga harus jelas kan diatur dengan pengelolaan yang baik ini. Ini menjadi masukan untuk Desain Besar Olahraga Indonesia dan juga untuk untuk penguatan dari RUU SKN ke depan. Jadinya jangan sampai terjadi, seperti halnya juga berkenaan dengan karyawan pun WADA juga menginginkan begitu, ada karyawan yang bertugas secara rutin. Artinya apa? Ini LADI juga harus ada kantornya kan begitu



maksudnya mereka, profesional, haruslah juga didukung dengan anggaran. Jadi anggaran 7 miliar tadi sewa gedung dan sebagainya saya bingung juga bayar gajinya.

Ini Pak Gatot jadi PR kita juga bersama karena jangan sampailah induk organisasi yang mengelola olahraga ini jadi permasalahan. Kita lihat bulan kemarin itu September saya baca koran saja masih ada karyawan dari KONI yang belum dapat gaji, ini kan menjadi perhatian kita bersama, ini kan jadi pemberitaan di luar. Berkenaan dengan administrasi ini, ini enggak boleh lagi kita main-main, memang semua negara sekarang menggunakan administrasi yang sangat ketat. Kita belajar bagaimana taekwondo kita tidak boleh bertanding di Yordania, walaupun kita sudah ke sana, atletnya sudah berangkat sana tetap enggak boleh tanding, bagi orang luar ini aturan ya aturan.

Kalau kalian enggak patuh aturan ya kalian enggak boleh, mau namanya "aduh tolong dong belas kasihan, kami sudah datang jauh-jauh, sudah datang ke sana", tetap mereka itu adalah aturan ya aturan, tetap ditegakkan. Itu mengajarkan untuk kita disiplin. Itulah yang harus kita belajar, jadi dunia organisasi sekarang berubah, dunia olahraga pun berubah. Makanya sempat kan di Facebook itu ramai, orang dari Palestina saja lagi perang waktu itu saja bisa bertanding taekwondo di Yordania, masa kita yang hidup tenteram, nyaman ini enggak bisa bertanding di sana.

Itu beberapa catatan yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan juga Pak Gatot 2 minggu ke depan kita akan melaksanakan World Superbike. Nah ini juga harus kita tanya yang jelas jangan sampai nanti tambah lagi beban sanksinya. Kalau memang enggak boleh ya sudah kita harus bisa memberikan suatu masukan yang jelas kepada masyarakat bahwa ini kan dalam proses pembenahan. Kita juga ya enggak menutup diri begitu, jangan kita kucing-kucingan nanti ada masalah terjadi lagi. Karena Mas Rano ada pembalap Indonesia di sana. Jadi di kelas 600 itu ada pembalap Indonesia dan di kelas 300 kemungkinan ada pembalap Indonesia juga, nah kalau hujan itu kemungkinan besar pembalap Indonesia sering di depan, belajar selalu kalau hujan di Malaysia itu, selalu pembalap Malaysia juara di MotoGP.

#### **F-PDI PERJUANGAN (RANO KARNO, S.IP.):**

Mas Dafi tapi kalau hujan bendera Indonesia enggak bisa bergerak, ada air.

#### **F-PKB (Dr. H. MUHAMMAD KADAFI, S.H., M.H.):**

Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ke depan kita akan mempunyai suatu *rule* yang jelas, hubungan baik juga dengan pengurusan secara dunia dan juga mudah-mudahan ini jadi pelajaran yang baik buat kita dan enggak kita ulangi lagi di kemudian harinya.

Mungkin itu, terima kasih.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.  
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Dari Pak Musthofa Fauzi ke Pak Mustafa Kamal, silakan.

**F-PKS (H. MUSTAFA KAMAL, S.S.):**

*Bismillahirrahmanirrahim.  
Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Perkenalkan saya Mustafa jadi ada kembaran di sini, jangan khawatir saya akan bela mati-matian Pak, ini perkongsian antar sesama Musthofa.

Pimpinan dan Anggota DPR yang saya hormati.  
Pak Gatot.  
Pak Musthofa.  
Pak Rheza.  
Ibu Dessy.  
Ibu Sri Wahyuni yang saya hormati.

Saya jadi terharu pada awalnya sempat berpikir akan marah begitu, ini malah jadi luar biasa kita berikan apresiasi atas perjuangannya di tengah situasi yang sangat berat dan Anda mendapatkan hujan hujatan. Ini yang mungkin secara psikologis harus kita kembalikan marwahnya. Tadi saya setuju sekali bahwa ini kita harus dudukkan secara proporsional dan tampaknya Komisi X yang harus mengambil peran ini. Saya melihat kalau menunggu pihak-pihak terkait di pemerintahan, selain mungkin ada kesibukan tapi saya lihat perintah dari Presiden untuk investigasi kok belum ada tanda-tandanya. Tapi kalau mungkin Komisi X DPR RI bisa memfasilitasi, saya kira ini akan baik sekali.

Ini memang ada hikmahnya, saya jadi paham kenapa kemarin Rusia benderanya itu tidak ada ya kecuali federasi olahraganya selama Olimpiade, ternyata masalahnya sama dengan kita, ini beda Pak?

**KETUA UMUM KETUA UMUM LADI (dr. MUSTHOFA FAUZI):**

Bisa saya jelaskan sedikit, beda kita dengan Rusia, Rusia itu ada proses doping yang terjadi secara sistematis pada atletnya berdasarkan laporan, kalau kita lebih banyak administratif Pak.

**KETUA RAPAT:**

Atau nanti diteruskan saja.

**F-PKS (H. MUSTHOFA KAMAL, S.S.):**

Tapi mungkin kita punya hiburan sedikit bahwa bukan hanya Indonesia yang seperti itu, ada Rusia, ini kan cari-cari alasan juga. Cuma ya kita tidak boleh membenarkan apa yang terjadi, saya ingin kita ada investigasi di DPR, apakah kita perlu Panja atau Pansus ini sampai ke angket atau apa kan karena kalau investigasi kita ya mau tidak mau harus punya kewajiban paksa memanggil orang ke sini. Ini kita harus telaah sesuai MD3, tapi saya minta pada Pimpinan untuk mempelajari bagaimana untuk kita punya kemampuan intervensi dalam persoalan ini.

Kemudian yang kedua yang saya lihat jadi hikmah juga dalam pembahasan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional, saya lihat kita perlu menginventarisir seluruh perjanjian internasional yang sudah diratifikasi di bidang olahraga. Ini hanya satu kasus saja untuk LADI, jangan-jangan ada lagi yang banyak kesepakatan-kesepakatan internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, tapi pelembagaannya terkatung-katung seperti ini dan kemudian pada waktunya meledak lagi jadi persoalan, jadi masalah, mungkin perwasitan, mungkin sarana olahraga atau apa yang sudah kita ratifikasi saya kira nanti di Undang-Undang SKN meskipun kita agak mundur sedikit, kita minta mungkin pemerintah menyajikan seluruh perjanjian di bidang olahraga yang sudah kita ratifikasi, supaya itu tertuang di SKN dan kita kawal.

Saya lihat ini setelah nanti kita punya inventaris itu lalu di Undang-Undang SKN ada, maka tugas Komisi X itu pada setiap rapat mengawasi itu, meminta laporan secara berkala. Sehingga Komisi X saya kira di staf semua sudah punya daftar lengkap, setiap rapat dengan dengan Kemenpora itu hal-hal yang terkait dengan kesepakatan internasional kita lihat kinerjanya, kita pantau dan kemudian kita dukung anggarannya sesuai karena itu wajah Indonesia. Kalau kita terus-menerus polanya seperti yang kemarin ya ini bisa berbahaya, sewaktu-waktu akan terjadi ledakan.

Apalagi saya lihat ini LADI melakukan sosialisasi, edukasi, pengawasan doping baik dalam kompetisi maupun di luar kompetisi ini sepanjang masa, sepanjang waktu. Jadi ini organisasi yang harusnya ditopang secara kuat ya oleh negara atau kita pastikan pengawasannya, sehingga walaupun ada kemandirian ada pihak yang mengawasi, jangan kemudian berjalan dengan sendirinya. Saya kira Komisi X bisa mengambil inisiatif.

Lalu kemudian yang kedua, yang dilakukan oleh pengurus selama ini kita bisa kategorikan apa? Apakah ini kejahatan administrasi atau ini kejahatan terhadap kepentingan publik atau ini kejahatan terhadap negara? Ini saya mohon maaf pakai istilah kejahatan karena kita tidak boleh memandang rendah persoalan ini, seperti tidak memberikan *password* pada persoalan kepentingan publik, kepentingan negara yang mengalami kegentingan kemarin itu kalau saya dengar cerita tadi kan. Padahal kalau mungkin kita sudah dapat *password* lebih awal, mungkin persoalan-

persoalannya bisa kita penuhi. Ini bayangkan gara-gara *password* sebuah negara dipermalukan, siapa orang yang sampai tidak menyerahkan *password* seperti itu, orang seperti apa ini.

Jadi saya kira ini harus ada yang melakukan investigasi sampai kemudian ada sanksinya, saya juga bertanya dengan segala kerendahan hati di sini adakah ini juga di Undang-Undang SKN adakah sanksi bagi pengurus-pengurus ya di dunia keolahragaan ini yang melakukan kelalaian-kelalaian seperti itu, tentu bisa dibuat bertingkat sanksinya. Tapi saya kira setiap orang yang sudah berkomitmen untuk menjabat satu amanah, dia harus bisa mempertanggungjawabkannya apalagi menyangkut kepentingan publik, menyangkut kepentingan bangsa dan negara.

Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Waktunya habis ini padahal ada yang baru datang ini Pak Sidot, sudah cukup ya? Terima kasih.

Saya kira ini tinggal merespons, tadi ada beberapa saya kira catatan itu, termasuk juga ini saya menambahkan yang ini yang halaman 5 itu kan ternyata, kenapa kalau belum dibuat LADI, itu baru kemudian KOI berfungsi ya. Jadi kalau *if this design has not been made by the competent public authority, the entity shall be the country's National Olympic Committee or its designee*. Jadi ini menghilangkan seperti seolah-olah enggak ada LADI dong, kemudian kalau yang negosiasi dan sebagainya langsung KOI, ini kan mengeliminasi LADI berarti kan, kalau belum terbentuk atau tidak terbentuk, sekarang ini yang komunikasi KOI malah.

Ini mungkin tambahan langsung bisa dijelaskan, ini tadi catatan bagus juga dari Pak Mustafa Kamal yang tentang sanksi dan tadi satunya ratifikasi-ratifikasi, mungkin apakah hanya ini saja atau mungkin kalau banyak berarti ini kayaknya perlu masukan, undang-undang berapa itu? Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas itu ternyata karena kita sudah tanda tangan CRPD, *Convention on the Rights for Persons with Disabilities* misalnya begitu. Ini jangan-jangan banyak konvensi-konvensi yang kita sudah meratifikasi, kalau belum masuk nanti kita mengubah lagi.

Mungkin beberapa menit silakan, Pak Musthofa dahulu atau mungkin baru terus. *Monggo.*

**KETUA UMUM LADI (dr. MUSTHOFA FAUZI):**

Terima kasih banyak.

Kami sangat berterima kasih atas segala masukan, saran termasuk juga mungkin ada sedikit perlu penjelasan dari kami. Yang pertama sekali, saya ambil yang dari belakang dahulu yang Bapak Pimpinan tadi yang disampaikan sehubungan dengan Appendix 1 *United Nation Convention begin doping in sport*. Ini di dalam ini tersebut bahwa negara yang mendapat penandatanganan *signatory* daripada *convention*, maka dia mempunyai kewajiban untuk membuat lembaga anti-doping NADO begitu, dengan yang bertanggung jawab utama adalah untuk mengadopsi dan mengimplementasikan *World Anti-Doping code* ini mulai dari aturan-aturannya, pengambilan sampling, semuanya ini. Manakala negara tidak membuat, maka fungsi nasional anti-doping-nya itu dikelola oleh *National Olympic Committee*, ini yang dimaksud di sini, ini yang dimaksudkan.

Nah kalau komunikasi KOI ke dunia internasional kemarin hanya kebetulan pada saat yang bersamaan Bapak Sapta sedang mengikuti acara *International Olympic Committee Meeting* di Yunani dan di Amsterdam dan dia memanfaatkan hubungan ini dan di dalam WADA itu juga selalu menembuskan semua surat-surat sering kepada ke KOI ini, jadi mereka sudah memang ada hubungan. Sama seperti saat ini kan salah satu *stakeholders* dari WADA itu adalah *International Olympic Committee, National Olympic Committee*, itu di *stakeholders*-nya kalau kita baca di organisasi WADA-nya itu *stakeholders*.

Sama seperti kita di LADI di dalam *scoop* kecil, *stakeholders* utama LADI itu adalah pemerintah dalam hal ini Kemenpora yang punya *leading sector* di bidang ini. Kemudian ada lagi itu federasi nasional, semua cabang-cabang olahraga seperti yang Prof. Djohar tadi sampaikan, kami juga sudah masuk ke *stakeholders*. Karena saya menerapkan ini prinsip-prinsip karena saya lama mengelola rumah sakit dan sebagainya, *stakeholders* adalah bagian yang harus, pemangku kepentingan yang harus kami juga upayakan hubungan yang baik, memberikan edukasi dan sebagainya dan ini sudah jalan termasuk kepada PSSI, tapi belum semua. Seperti pelatihan, pelatih kemarin di Bandung kami masuk untuk memberikan tapi kan belum semua, baru mulai jalan ini semuanya di cabor-cabor. Inilah *stakeholders, stakeholders* yang lain atlet sendiri termasuk para ahli-ahli di bidang keolahragaan itu *stakeholders* yang harus kami rangkul dunia olahraga ini.

Kemudian dari Pak Pimpinan, kemudian daripada Ibu siapa tadi, mereka juga menyayangkan bahwa LADI masih menggunakan email yang *generic* sekali. Kami jujur saat ini kami sudah terpikir untuk, tapi belum kami lakukan, kami melakukan tugas-tugas utama kami dahulu. Kami menginginkan umpamanya [fauzi@wada.com](mailto:fauzi@wada.com) ini karena kami juga iri melihat Pak Oesman Sapta kok bisa dapat [olympic.com](http://olympic.com), Pak Raja Sapta salah, jadi kami menginginkan ini tapi ini belum bisa kami sampaikan sekarang karena kami masih ya kami lagi orang dihukum, kami masalah yang dihukum dahulu yang kami hadapi, selesaikan dahulu. Bilamana anginnya sudah mulai baik,

ini yang akan kami inginkan, bahwasanya kami menginginkan bahwa email kami itu nantinya umpamanya fauzi@wada.com begitu pada akhirnya. Karena itu ada, seperti Singapura, seperti Jepang itu pengurusnya itu dikasih Pak. Jadi ini komunikasi kita dengan WADA sudah bagus Pak, nanti tinggal kita melangkah minta ini.

#### **F-PDI PERJUANGAN (RANO KARNO, S.IP.):**

Mungkin WADA tahu kalau LADI ini pengurusannya belum diakui kali, masih kacau.

#### **KETUA UMUM LADI (dr. MUSTHOFA FAUZI):**

*Insyah Allah* sudah Pak, kalau sekarang kami sudah intens sekali. Bahkan *Asian and Oceania* WADA yang direktornya sudah menawarkan untuk kita *meeting* lagi dalam minggu-minggu ini, tapi dengan satu syarat bahwa jangan *ngomongin* sanksi tapi kita *ngomongin* untuk kemajuan ke depan. Karena mereka tersudut kemarin atas protes-protes kami, kami sampaikan termasuk kesalahan-kesalahan mereka dan akan menjadi *review* internal mereka. Jadi kita mari melangkah ke depan, itu juga bentuk pengakuan dia terhadap kesalahan mereka, itu ada emailnya ke Pak Sesmen ya. Jadi dia menawarkan tapi kita belum bisa menentukan tanggal, kita melihat, karena kami juga kesibukan mengawasi Peparnas yang saat ini sedang berjalan di Papua.

Kemudian kami sangat senang sekali bahwa tadi disampaikan juga bahwa kami lagi berniat untuk kalau memang kesempatan dengan, bahwa kami ingin membangun *data base* karena kami pernah mengikuti seminar yang pesertanya hanya beberapa negara. Ada dua negara yang kami lihat melalui *online* seminar, semua ada yang seminar kami aktif Pak karena kami orang baru sehingga kami harus belajar banyak. Jadi Korea dan Australia itu mempunyai sistem *data base* atletnya yang bagus sekali dan itu kami akan tiru. Ke depannya *Insyah Allah* setelah kita masalah-masalah ini arahnya kami akan membangun dan itu atletnya bisa masukkan sendiri dan kita memantau ke mana lebih mudah, ini nanti eranya digitalisasi.

Ini kemudian memang betul bahwa hikmahnya kejadian ini LADI menjadi terkenal, termasuk kami juga menjadi dikenal, sekaligus dikecam. Bahkan saya sudah punya cucu, cucu saya kelas berapa SD saja sudah bisa mengerti karena dia medsos kan, wah katanya kakeknya menjadi tersangka sekarang kan, terhujat, dia *ngomong* sama ibunya, kayak apa yang kami harus hadapi, bukan cuma diri kami saja, keluarga kami pun ikut. Anak saya sedang pendidikan saja juga merasa teman-temannya, kebetulan anak saya dokter pendidikan spesialis, kok Bapakmu jadi terhujat begini katanya, ya sudah terima saja. Kita tidak bisa *ngomong* apa pun saat ini, kita terima saja dan kita langkah buktikan bahwa kita bisa memperbaiki semua ini, *Insyah Allah*, Allah memberi kemudahan hanya ini saja yang kami bisa sampaikan.

Termasuk juga teman kami dr. Rheza, Ibu Dessy, bahkan dr. Rheza di mal pun dibilang pengkhianat bangsa, di *website*. Jadi begini kami kami harus menghadapi, ini kami terima memang kenyataan, orang tidak tahu latar belakangnya dan ini yang harus kami terima dan semuanya ada hikmahnya, tidak akan terjadi kecuali Allah berkehendak dan kehendak-Nya memperbaiki LADI, yang selama ini LADI organisasinya dianggap dari Bapak Prof. tadi seperti, seperti ini dianggap sah-sah saja ternyata salah semua dari sejak tahun 2006. Kami sudah berkonsultasi sama Prof. Toho adalah Ketua LADI pertama, seperti inilah dahulu, saya berkonsultasi. Artinya hikmah ini harus kita akui, jadi Allah memberikan ini ya bukannya kita meng-*excuse* ya Pak, kita harus berbenah dan semuanya harus kita tuntaskan ini. Mungkin Prof. Djohar juga enggak tahu bahwa Ladi ternyata organisasi dan sebagainya, ini memang perlu kita baik.

Sekali lagi kami ingin sampaikan dari Pak Rano maupun Pak Andreas tadi sangat senang sekali kami atas *support*-nya dan *Insya Allah* semua yang kita lakukan ini mendapat kemudahan langkah kami ke depan bahwa kami saat ini ya memang harus dan tidak ada kata lain kecuali kami terus maju untuk membenahi semua ini, apa pun itu saat ini.

Saya kira ini saja dari karena waktunya sudah lewat.

#### **KETUA RAPAT:**

Cukup ya karena waktunya sudah.

Pak Gatot mau menambahi sepatah-dua patah kata.

#### **DEWAN PEMBINA LADI (Drs. GATOT SULISTIANTORO DEWA BROTO, M.B.A.):**

Kami akan tayangkan surat yang kami dikirimkan atas perintah Pak Menteri kepada kami tanggal 8 Oktober, 8 Oktober itu sehari setelah mendapatkan sanksi dari LADI. Kami bisa bayangkan kalau saat itu surat tidak segera kami kirimkan, itu kami akan semakin menjadi kecaman. Poin dari surat itu hanya intinya kenapa sih LADI terlambat secara administrasi untuk pengiriman sampel, itu kami menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia itu pada dasarnya serius sekali untuk tentang masalah *compliance* ini.

Kemudian yang kedua, bahwasanya LADI itu saat ini sedang sibuk dengan PON. Kami jelaskan PON itu apa, ini ujung-ujungnya masalah komunikasi juga, PON itu apa, diselenggarakan kapan, siapa yang membuka bahwa itu yang membuka adalah yang mulia Bapak Presiden. Terus lanjut cepata saja, kemudian kami menjelaskan mereka akan ke pihak LADI akan tetap akan berusaha *compliance* dengan aturan dari WADA itu sendiri.

Oke lanjut, kami sebutkan juga bahwasanya karena posisi pandemi COVID-19 ini LADI ada kesulitan dan LADI akan tetap berusaha untuk mengatasi dan memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut dan itu atas perintah

presiden, eh atas perintah Bapak Menteri mengatakan tolong Pak Ses cepat, kalau enggak nanti posisi hujatan publik akan sangat tinggi sekali surat.

Kemudian surat yang kedua, yang cukup efektif *alhamdulillah* untuk menyelamatkan sehingga Indonesia Raya bisa diperdengarkan tanggal 16 Oktober itu hanya kami kirimkan tepat jam 01.00 WIB tengah malam, dini hari hari Minggu pada saat beberapa jam lagi Indonesia akan final untuk Piala Thomas. Jadi itu kami kirimkan tanggal 16 Oktober jam 01.00 WIB dini hari karena saya masih ingat waktu itu kita baru saja menghadiri hajatannya Ibu Iliza yang tanggal 15 ya, setelah keluar dari tempat acara saya dikontak Pak Menteri. :Pak Ses, tolong segera kamu kirim surat, jangan sampai menunda hari Senin, hari Senin urusan panjang sekali". Saya kirimkan surat itu tengah malam setelah acara Ibu Iliza.

Ada poin yang menarik di sini, tentang Thomas Cup *today the next morning.this* kami sebutkan tim Indonesia akan maju di final BWF dan kemungkinan Indonesia akan *would be the winner*. Kami ingin memastikan *to be allowed to get the normal ceremony presiding for racing national flag and national anthem*. Habis itu tengah malam jam 02.00 WIB saya telepon ke Montreal, intinya kalau *national anthem* bolehlah, tetapi kalau *national flag* itu enggak ada ampun, ya sudah. Jadi poinnya adalah kalau ini tidak kami kirimkan mungkin kondisi menjadi lebih buruk lagi, *national anthem* enggak boleh, *national flag* juga enggak boleh.

Demikian dari kami, terima kasih Pak Pimpinan.

**F-PDI PERJUANGAN (RANO KARNO, S.IP.):**

Pak Ketua, izin sedikit saja.

**KETUA RAPAT:**

Iya.

**F-PDI PERJUANGAN (RANO KARNO, S.IP.):**

Membaca penutup ini tanda tangan ini Plt. Sekretaris ini, pertanyaan saya nanti Pak Gatot hadirkah di konsinyering atau eselon I siapa yang hadir? Karena yang kita kawal ini masalah LADI, jangan dari awal lagi nanti memahasnya.

Mungkin itu, terima kasih Pak.

**DEWAN PEMBINA LADI (drs. GATOT SULISTIANTORO DEWA BROTO, M.B.A.):**

Mohon izin, *alhamdulillah* saya diperintahkan oleh Pak Menteri sebagai tenaga ahli untuk hadir mendampingi.



**KETUA RAPAT:**

Iya, ini jadi datang substansial bukan formal, kalau formalnya siapa Pak Gatot?

**DEWAN PEMBINA LADI (DRS. GATOT SULISTIANTORO DEWA BROTO, M.B.A.):**

Nanti ada Pak Plt. Sesmenpora Pak Jonni Madrizal, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Iya sudah terima kasih.

Mohon maaf Bapak/Ibu saya tidak bisa membacakan ini karena banyak, jadi karena masukan-masukan juga banyak juga ini tapi tidak perlu tanda tangan berdua, jadi saya tanda tangan saja sehingga jadi saya tidak ada beban ini nanti kesimpulan dari RDPU hari ini, tapi penguatan organisasi LADI nanti bentuknya apa nanti kita bersama-sama di mana sebelah, pokoknya di konsinyering. Kemudian memastikan komunikasi LADI ini saya kira tidak bisa berhenti-berhenti begini, tetapi terus kenapa bila ada hal-hal yang ada kendala apa segala macam saya kira ini pengalaman dari yang sebelumnya tidak bisa didiamkan begitu saja, tetapi tetap harus segera melakukan aksi dan juga saya kira tadi sudah dijelaskan oleh Pak dr. Musthofa Fauzi bahwa beban masa lalu *Insyah Allah* sudah diselesaikan ya. Mudah-mudahan sudah selesai semua ini, kalau membawa beban di masa lalu ini berat memang, beban-beban yang lain mungkin bisa, tapi beban masa lalu.

Kemudian yang prinsip memelihara hubungan yang baik dengan WADA itu *World Anti-Doping Agency* ini di bawah IOC menghindari sanksi-sanksi atau *banned* lagi yang nanti selanjutnya, saya kira begitu. Sebetulnya saya pengen menyapa juga Pak dr. Rheza segala macam itu karena ini ternyata Beliau yang mengadapi TV, satu hari pernah bersama ya di tanggal berapa? Oktober 24, wah ini jadi siap dihujat ini Beliau. Pak Musthofa ini, memilihnya orang-orang yang siap, siap dihujat, siap dikuliti, di televisi ya? TV One kalau enggak salah. Tapi terima kasih saya kira Bapak-bapak di LADI ini ampuh juga ini ujian pertama, tetapi memang selanjutnya tidak hanya bisa mengatasi di depan sekarang ini karena saya kira ujiannya tidak hanya pribadi ternyata ya Pak, keluarga tadi.

Sekali lagi mohon maaf saya tidak bisa membaca, usulan Prof. Djohar juga bahwa ini kita setuju saja ya, percaya saja ini. Intinya itu semua sudah diakomodasi dan seizin Bapak/Ibu saya kira dengan mengucapkan *alhamdulillahirabbil alamin* maka RDPU hari ini dinyatakan ditutup dan kalau di sana-sini banyak kekurangan saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih. Dengan mengucapkan *alhamdulillahirabbil alamin* maka RDPU hari ini ditutup.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.51 WIB)**

**JAKARTA, 8 NOVEMBER 2021**

**a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,**

**DADANG PRAYITNA, S.IP, M.H.  
NIP. 196708061990031003**